Katalog BPS: 9302002

### PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO MENURUT PENGELUARAN

Gross Regional Domestic Product by Expenditure

Kota Palembang/ Palembang City

2013-2017



Badan Pusat Statistik Kota Palembang

## PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KOTA PALEMBANG MENURUT PENGELUARAN 2013 - 2017

### PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KOTA PALEMBANG MENURUT PENGELUARAN 2013- 2017

ISSN : -

Nomor Publikasi : 16710.1803 Katalog BPS : 9302020.1671

Ukuran Buku : 20 x 26 cm

Jumlah Halaman : xii + 62 halaman

Naskah:

Seksi Neraca Wilayah dan Analisis

Gambar Kulit:

Subdirektorat Konsolidasi Neraca Pengeluaran, BPS RI

Diterbitkan Oleh:

Badan Pusat Statistik Kota Palembang

Dicetak Oleh:

CV. Alief Media Grafika

Boleh dikutip dengan menyebutkan sumbernya

### PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KOTA PALEMBANG MENURUT PENGELUARAN 2013-2017

### **Anggota Tim Penyusun:**

Pengarah : Ir. Taupiq Hidayat Nr, M.M.

Editor : Ir. Taupiq Hidayat Nr, M.M.

Penulis : 1. Ir. Prilly Partahian Hutapea, M.M.

: 2. Rossi, M.M.

3. Rahmat Kartolo, M.M.

https://palembangkota.hps.go.id

### **KATA PENGANTAR**

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu perangkat data ekonomi yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja pembangunan ekonomi suatu wilayah (provinsi maupun kabupaten/kota). Perangkat data ini dapat pula digunakan untuk kepentingan dan tujuan lain, seperti sebagai dasar pengembangan model-model ekonomi dalam rangka menyusun formulasi kebijakan, tingkat percepatan uang beredar (velocity of money), pendalaman sektor keuangan (financial deepening), penetapan pajak, kajian ekspor dan impor dan sebagainya.

Menurut teori ekonomi makro, penghitungan PDRB dapat dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu: pendekatan produksi/penyediaan (PDB menurut Lapangan Usaha/industry), pendekatan pengeluaran/permintaan akhir (PDB menurut Pengeluaran/expenditure) serta pendekatan pendapatan (PDB menurut pendapatan/income). Ketiga pendekatan penghitungan tersebut secara teori akan menghasilkan angka PDB yang sama.

Publikasi ini secara khusus membahas mengenai PDRB menurut pendekatan pengeluaran/permintaan akhir. Pendekatan ini dirinci menjadi beberapa komponen, yaitu: Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga, Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga, Pengeluaran Konsumsi Pemerintah, Investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto dan Perubahan Inventori), Ekspor Luar Negeri, Impor Luar Negeri, serta Ekspor Neto Antar Daerah (ekspor antar daerah dikurangi dengan impor antar daerah). Data PDRB dalam publikasi ini serta publikasi-publikasi selanjutnya mengunakan tahun dasar 2010, serta sudah menerapkan konsep *System of National Accounts 2008* seperti yang direkomendasikan oleh *United Nations*.

Kepada seluruh anggota Tim Penyusun Publikasi ini yang telah memberikan kontribusinya dalam mewujudkan publikasi ini disampaikan penghargaan yang setinggitingginya. Demikian pula kepada instansi pemerintah dan lembaga/perusahaan swasta yang telah memberikan dukungan data bagi penyusunan publikasi ini diucapkan terima kasih. Semoga kerjasama yang telah terjalin selama ini dapat terus berlanjut serta dapat ditingkatkan di masa-masa mendatang.

Terakhir, disadari bahwa data dan informasi yang disajikan dalam publikasi ini masih memerlukan penyempurnaan. Oleh karena itu, setiap masukan yang bersifat konstruktif sangat dihargai demi penyempurnaan isi publikasi ini selanjutnya.

Akhirnya, semoga publikasi ini bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukannya.

Palembang, Agustus 2018 KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK

Kota Palembang,

Ir. Taupiq Hidayat Nr, MM

https://palembangkota.hps.go.id

### **DAFTAR ISI**

			Halaman
Kata Peng	gantar		v
Daftar Isi			vii
Daftar Ta	bel		ix
Daftar G	rafik		xi
Daftar La	mpiran		xii
BAB I	PEN	DAHULUAN	1
	1.1.	Pengertian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	2
	1.2.	Kegunaan Statistik PDRB	3
BAB II	MET	ODE ESTIMASI DAN SUMBER DATA	5
	2.1	Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga	6
	2.2	Pengeluaran Konsumsi Akhir LNPRT	9
	2.3	Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah	11
	2.4	Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	14
	2.5	Perubahan Inventori	19
	2.6	Ekspor dan Impor	22
BAB III	TINJ.	AUAN PEREKONOMIAN KOTA PALEMBANG BERDASARKAN	
	PDR	B PENGELUARAN TAHUN 2013-2017	24
	3.1 7	Tinjauan Agregat PDRB Kota Palembang Menurut Pengeluaran	25
	3.2 I	Perkembangan Konsumsi Akhir Rumah Tangga	30
	3.3 I	Perkembangan Konsumsi Akhir LNPRT	35
	3.4 Perkembangan Konsumsi Akhir Pemerintah		35
	3.5 I	Perkembangan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	38
	3.6 I	Perkembangan Perubahan Inventori	39
	3.7 I	Perkembangan Ekspor	40
	3.8 I	Perkembangan Impor	41

BAB IV	PERKEMBANGAN AGREGAT PDRB MENURUT PENGELUARAN KOTA		
	PALEMBANG TAHUN 2013-2017	43	
	4.1. PDRB (Nominal)	44	
	4.2. Perbandingan Penggunaan PDRB untuk Konsumsi Akhir Rumah Tangga		
	terhadap Ekspor	45	
	4.3. Perbandingan Konsumsi Rumah Tangga terhadap Pembentukan Modal		
	Tetap Bruto (PMTB)	46	
	4.4. Perbandingan Konsumsi Akhir terhadap PDRB	46	
	4.5. Perbandingan Ekspor terhadap PMTB	47	
	4.6. Perbandingan PDRB terhadap Impor	48	
	4.7. Keseimbangan Total Penyediaan dan Total Permintaan	49	
	4.8. Neraca Perdagangan (Trade Balance)	50	
	4.9. Incremental Capital Output Ratio (ICOR)	51	
BAB V	PENUTUP	53	
	LAMPIRAN	55	
	DAFTAR PLISTAKA	62	

### **DAFTAR TABEL**

		Halaman
Tabel 1	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kota Palembang	
	Tahun 2013-2017	25
Tabel 2	PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Kota	
	Palembang Tahun 2013-2017	26
Tabel 3	Distribusi PDRB ADHB Menurut Pengeluaran Kota Palembang Tahun 2013-	
	2017	28
Tabel 4	Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Menurut Pengeluaran Kota Palembang	
	Tahun 2013-2017	29
Tabel 5	Indeks Implisit PDRB Menurut Pengeluaran Kota Palembang Tahun 2013-	
	2017	29
Tabel 6	Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kota	
	Palembang Tahun 2013-2017	31
Tabel 7	Struktur Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kota Palembang	
	Tahun 2013-2017	32
Tabel 8	Pertumbuhan Riil Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga	
	Kota Palembang Tahun 2013-2017	33
Tabel 9	Pertumbuhan Implisit (Indeks Harga) Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah	
	Tangga Kota Palembang Tahun 2013-2017	34
Tabel 10	Perkembangan Penggunaan Konsumsi LNPRT Kota Palembang Tahun	
	2013-2017	35
Tabel 11	Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah Kota Palembang	
	Tahun 2013-2017	36
Tabel 12	Perkembangan dan Struktur PMTB Kota Palembang Tahun 2013-	
	2017	39
Tabel 13	Perkembangan dan Struktur Perubahan Inventori Kota Palembang Tahun	
	2013-2017	40
Tabel 14	Perkembangan Ekspor Kota Palembang Tahun 2013-2017	41
Tabel 15	Perkembangan Impor Kota Palembang Tahun 2013-2017	42

Tabel 16	Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Perkapita Kota Palembang	
	Tahun 2013-2017	44
Tabel 17	Perbandingan PDRB Pengeluaran untuk Konsumsi Akhir Rumah Tangga	
	terhadap Ekspor Tahun 2013-2017	45
Tabel 18	Perbandingan Konsumsi Rumah Tangga terhadap PMTB Tahun 2013-	
	2017	46
Tabel 19	Proporsi Total Penggunaan Konsumsi Akhir terhadap PDRB Kota	
	Palembang terhadap Impor Kota Palembang Tahun 2013-2017	47
Tabel 20	Rasio Ekspor terhadap PMTB (ADHB) Tahun 2013-2017	48
Tabel 21	Rasio PDRB terhadap Impor Kota Palembang Tahun 2013-2017	48
Tabel 22	Sisi Keseimbangan Penyediaan dan Permintaan Kota Palembang Tahun	
	2013-2017	49
Tabel 23	Neraca Perdagangan Kota Palembang Tahun 2013-2017	50
Tabel 24	Incremental Canital Outnut Ratio Kota Palembang Tahun 2013-2017	51

### DAFTAR GRAFIK

C (1.1		Halaman
Grafik 1	Perbandingan PDRB adh Berlaku dan adh Konstan 2010 Menurut	
	Pengeluaran Kota Palembang Tahun 2013-2017	27
	25.90.id	
	Aroja, io Propinsi de la companya della companya della companya de la companya della companya de	
	Perbandingan PDRB adh Berlaku dan adh Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Kota Palembang Tahun 2013-2017	

### **DAFTAR LAMPIRAN**

		Halaman
Tabel 1	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut	
	Pengeluaran Kota Palembang	55
Tabel 2	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Menurut	
	Pengeluaran Kota Palembang	56
Tabel 3	Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga	
	Berlaku Menurut Pengeluaran Kota Palembang	57
Tabel 4	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga	
	Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Kota Palembang	58
Tabel 5	Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto (2010=100) Menurut	
	Pengeluaran Kota Palembang	59
Tabel 6	Laju Pertumbuhan Indeks Harga Implisit Produk Domestik Menurut	
	Pengeluaran Kota Palembang	60



### 1.1 PENGERTIAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah/regional dalam suatu periode tertentu adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi.

PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang pada suatu tahun tertentu sebagai dasar. PDRB atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran serta struktur ekonomi. PDRB atas dasar harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi pada suatu periode ke periode (tahun ke tahun atau triwulan ke triwulan). Dalam publikasi ini tahun dasar yang digunakan adalah tahun 2010 dan ini tentu akan mencerminkan struktur ekonomi terkini.

Terdapat tiga pendekatan yang biasanya digunakan dalam menghitung angka-angka PDRB, yaitu:

### a. Menurut Pendekatan Produksi

Menurut pendekatan ini, PDRB adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu negara dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Unit-unit produksi tersebut dalam penyajiannya dikelompokkan menjadi 17 kategori lapangan usaha yaitu: 1. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, 2. Pertambangan dan Penggalian, 3. Industri Pengolahan, 4. Pengadaan Listrik dan Gas, 5. Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, 6. Konstruksi, 7. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, 8. Transportasi dan Pergudangan, 9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, 10. Informasi dan Komunikasi, 11. Jasa Keuangan dan Asuransi, 12. Real Estate, 13. Jasa Perusahaan, 14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, 15. Jasa Pendidikan, 16.

Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, 17. Jasa lainnya. Setiap kategori lapangan usaha tersebut dirinci lagi menjadi sub-sub kategori lapangan usaha.

### b. Menurut Pendekatan Pendapatan

PDRB menurut pendekatan ini merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu negara dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Balas jasa faktor produksi yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan; semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak lainnya. Dalam definisi ini, PDRB mencakup juga penyusutan dan pajak lainnya atas produksi neto (pajak atas produksi dan impor dikurangi subsidi).

### c. Menurut Pendekatan Pengeluaran

PDRB adalah semua komponen permintaan akhir yang terdiri dari: (1) pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga (2) pengeluaran konsumsi akhir lembaga non profit yang melayani rumah tangga (3) pengeluaran konsumsi akhir pemerintah, (4) pembentukan modal tetap bruto, (5) perubahan inventori, dan (6) ekspor neto (ekspor dikurangi impor).

Secara konsep ketiga pendekatan tersebut akan menghasilkan angka yang sama. Jadi, jumlah pengeluaran akan sama dengan jumlah barang dan jasa akhir yang dihasilkan dan harus sama pula dengan jumlah pendapatan untuk faktor-faktor produksi. PDRB yang dihasilkan dengan cara ini disebut sebagai PDRB atas dasar harga pasar, karena di dalamnya sudah dicakup pajak lainnya atas produksi neto.

### 1.2 KEGUNAAN STATISTIK PDRB

Data PDRB adalah salah satu indikator makro yang dapat menunjukkan kondisi perekonomian regional setiap tahun. Manfaat yang dapat diperoleh dari data ini antara lain adalah:

- PDRB harga berlaku nominal menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu negara. Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar, begitu juga sebaliknya.
- 2. PDRB harga konstan (riil) dapat digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap lapangan usaha dari tahun ke tahun.

- 3. Distribusi PDRB harga berlaku menurut lapangan usaha menunjukkan struktur perekonomian atau peranan setiap lapangan usaha dalam suatu negara. Lapangan usaha yang mempunyai peran besar menunjukkan basis perekonomian suatu negara.
- 4. PDRB harga berlaku menurut pengeluaran menunjukkan produk barang dan jasa yang digunakan untuk tujuan konsumsi akhir, investasi dan diperdagangkan dengan pihak luar negeri.
- 5. Distribusi PDRB menurut pengeluaran menunjukkan peranan kelembagaan dalam menggunakan barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai sektor ekonomi.
- 6. PDRB pengeluaran atas dasar harga konstan bermanfaat untuk mengukur laju pertumbuhan konsumsi akhir, investasi dan perdagangan luar negeri.
- 7. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.
- 8. PDRB per kapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk suatu wilayah.

# BAB II METODE ESTIMASI DAN SUMBER DATAA

### 2.1 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA

### i. Pendahuluan

Sektor rumah tangga mempunyai peran yang cukup besar dalam perekonomian. Hal ini tercermin dari besarnya sumbangan konsumsi rumah tangga dalam pembentukan PDRB pengeluaran. Di samping berperan sebagai konsumen akhir barang dan jasa, rumahtangga juga berperan sebagai produsen dan penyedia faktor produksi untuk aktivitas produksi yang dilakukan oleh sektor institusi lain.

### ii. Konsep dan definisi

Pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga (PKRT) adalah pengeluaran atas barang dan jasa oleh rumah tangga untuk tujuan konsumsi. Rumah tangga didefinisikan sebagai individu atau kelompok individu yang tinggal bersama dalam suatu bangunan tempat tinggal. Mereka mengumpulkan pendapatan, dapat memiliki harta dan kewajiban, serta mengkonsumsi barang dan jasa secara bersama-sama, utamanya kelompok makanan dan perumahan.

### iii. Cakupan

PKRT mencakup seluruh pengeluaran atas barang dan jasa oleh penduduk suatu wilayah, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar wilayah domestik suatu region. Jenisjenis barang dan jasa yang dikonsumsi diklasifikasikan menurut COICOP (Classifications of Individual Consumption by Purpose) seperti yang direkomendasikan oleh UN (United Nations), yaitu sebagai berikut:

- 1. Makanan dan minuman tidak beralkohol
- 2. Minuman beralkohol, tembakau dan narkotik
- 3. Pakaian dan alat kaki
- 4. Perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar lainnya
- 5. Furnitur, perlengkapan rumah tangga dan pemeliharaan rutin
- 6. Kesehatan
- 7. Angkutan
- 8. Komunikasi
- 9. Rekreasi/hiburan dan kebudayaan
- Pendidikan
- 11. Penyediaan makan minum dan penginapan/hotel
- 12. Barang dan jasa lainnya

Namun karena keterbatasan data, maka 12 COICOP tersebut dikelompokkan kembali manjadi hanya 7 COICOP, yaitu:

- 1. Makanan, Minuman, dan Rokok
- 2. Pakaian dan Alas Kaki
- 3. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga
- 4. Kesehatan dan Pendidikan
- 5. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya
- 6. Hotel dan Restoran
- 7. Lainnya

Pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga mencakup juga hal-hal sebagai berikut:

- Imputasi jasa persewaan rumah milik sendiri (owner occupied dwellings);
  Nilai perkiraan sewa rumah milik sendiri harus diperhitungkan karena rumah tangga pemilik, dianggap menghasilkan jasa persewaan rumah bagi dirinya sendiri. Imputasi sewa rumah diperkirakan atas dasar harga pasar, meskipun status rumah tersebut milik sendiri. Apabila rumah tangga benar-benar menyewa, maka yang dihitung adalah biaya sewa yang dibayar, baik dibayar penuh maupun tidak penuh karena mendapat keringanan biaya (subsidi atau transfer).
- Barang yang diproduksi dan digunakan sendiri;
- Pemberian/hadiah dalam bentuk barang yang diterima dari pihak lain;
- Barang dan jasa yang dibeli langsung (*direct purchase*) oleh residen di luar wilayah atau di luar negeri (diperlakukan sebagai impor)

Terdapat beberapa catatan yang perlu dikatahui berkaitan dengan PKRT ini, yaitu:

- Pembelian langsung oleh non-residen, diperlakukan sebagai ekspor dari wilayah tersebut)
- Pembelian barang yang tidak diproduksi kembali (diduplikasi), seperti barang antik, lukisan, dan hasil karya seni lainnya diperlakukan sebagai investasi atas barang berharga, bukan konsumsi rumah tangga.
- Pengeluaran rumah tangga untuk keperluan biaya antara dan pembentukan modal di dalam aktivitas usaha rumah tangga, tidak termasuk dalam pengeluaran konsumsi rumah tangga. Contoh, pembelian barang dan jasa untuk keperluan usaha, perbaikan besar rumah, dan pembelian rumah.

 Pengeluaran untuk keperluan transfer baik dalam bentuk uang atau barang, tidak termasuk sebagai pengeluaran konsumsi rumah tangga.

### iv. Penghitungan PKRT Tahunan

### 1. Sumber data

Sumber data yang digunakan untuk mengestimasi PKRT adalah:

- Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS, dalam bentuk pengeluaran konsumsi per-kapita seminggu untuk makanan, dan pengeluaran per-kapita sebulan untuk kelompok bukan makanan,
- Jumlah penduduk pertengahan tahun,
- Data Sekunder (dari BPS maupun dari luar BPS), dalam bentuk data atau indikator suplai komoditas dan jenis pengeluaran tertentu,
- Indeks Harga Konsumen (IHK).

### 2. Metode penghitungan

Penghitungan PKRT didasarkan pada hasil Susenas. Akan tetapi, karena hasil estimasi data pengeluaran rumah tangga yang berasal dari Susenas cenderung *underestimate* (terutama untuk kelompok bukan makanan dan kelompok makanan jadi), maka perlu dilakukan penyesuaian (*adjustment*). Dalam melakukan *adjustment*, digunakan data sekunder dalam bentuk data atau indikator *supply* dari berbagai sumber data di luar Susenas. Setelah diperoleh hasil *adjustment*, maka yang dilakukan adalah mengganti hasil Susenas dengan hasil penghitungan yang didasarkan pada data sekunder. Penggantian dilakukan pada level komoditas, kelompok komoditas, atau jenis pengeluaran tertentu. Hal ini dilakukan karena hasil penghitungan dari data sekunder dianggap lebih mencerminkan PKRT yang sebenarnya.

Langkah penghitungan di atas menghasilkan besarnya PKRT atas dasar harga berlaku (ADHB). PKRT atas dasar harga konstan (ADHK) 2010, diperoleh dengan cara men-deflate PKRT ADHB dengan IHK tahun dasar 2010.

Untuk lebih jelasnya, langkah-langkah penghitungan PKRT dapat diringkas sbb:

### 1. Estimasi PKRT hasil Susenas:

a. Makanan = pengeluaran konsumsi perkapita seminggu x (30/7) x 12 x jumlah penduduk pertengahan tahun

- b. Bukan makanan = pengeluaran konsumsi perkapita sebulan x 12 x jumlah penduduk pertengahan tahun
- 2. Data poin ke-1 dikelompokan menjadi 7 kelompok COICOP, dengan beberapa komoditas yang mungkin dikontrol secara tersendiri;
- 3. Terhadap data poin ke-2 dilakukan koreksi dengan menggunakan data sekunder atau indikator suplai komoditas dari jenis pengeluaran tertentu;
- 4. Diperoleh nilai PKRT yang telah di-adjust;
- 5. Susun Indeks Implisit berdasarkan IHK Kota (Provinsi/Kota terdekat);
- 6. PKRT ADHK 2010 diperoleh dengan membagi hasil poin ke-4 dengan hasil poin ke-5.

### 2.2 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR LNPRT

### i. Pendahuluan

Sektor Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) muncul sebagai sektor tersendiri dalam suatu perekonomian wilayah. Sektor ini berperan dalam menyediakan barang dan jasa bagi anggotanya maupun bagi rumahtangga secara gratis atau pada tingkat harga yang tidak berarti secara ekonomi. Harga yang tak berarti secara ekonomi artinya harga tersebut biasanya dibawah harga pasar (tidak mengikuti harga pasar yang berlaku).

### ii. Konsep dan definisi

LNPRT merupakan bagian dari lembaga non profit (LNP). Sesuai dengan fungsinya, LNP dibedakan atas LNP yang melayani rumah tangga dan LNP yang melayani bukan rumahtangga.

### Karakteristik unit LNP adalah sbb:

- LNP umumnya adalah lembaga formal, tetapi terkadang merupakan lembaga informal yang keberadaannya diakui oleh masyarakat;
- pengawasan terhadap jalannya organisasi dilakukan oleh anggota terpilih yang punya hak sama, termasuk hak bicara atas keputusan lembaga;
- setiap anggota mempunyai tanggung jawab tertentu dalam organisasi, dan tidak berhak menguasai *profit* atau surplus, karena *profit* yang diperoleh dari kegiatan usaha produktif dikuasai oleh lembaga;
- kebijaksanaan lembaga diputuskan secara kolektif oleh anggota terpilih, dan kelompok ini berfungsi sebagai pelaksana dari dewan pengurus; dan

• istilah *nonprofit* tidak berarti bahwa lembaga ini tidak dapat menciptakan surplus melalui kegiatan produktifnya, namun surplus yang diperoleh biasanya diinvestasikan kembali pada aktivitas sejenis.

LNPRT merupakan lembaga yang melayani anggotanya atau rumahtangga, serta tidak dikontrol oleh pemerintah. Anggota dari lembaga yang dimaksud disini adalah yang bukan berbentuk badan usaha. LNPRT dibedakan atas 7 jenis lembaga, yaitu: Organisasi kemasyarakatan, Organisasi sosial, Organisasi profesi, Perkumpulan sosial/kebudayaan/olahraga/hobi, Lembaga swadaya masyarakat, Lembaga keagamaan, dan Organisasi bantuan kemanusiaan/beasiswa.

### iii. Cakupan

Nilai PK-LNPRT sama dengan nilai output non-pasar yang dihasilkan LNPRT. Nilai output non pasar tersebut dihitung berdasarkan nilai seluruh pengeluaran LNPRT dalam rangka melakukan kegiatan operasionalnya. Pengeluaran yang dimaksud terdiri dari:

- a. Konsumsi antara, contoh: pembelian alat tulis, barang cetakan, pembayaran listrik, air, telepon, teleks, faksimili, biaya rapat, seminar, perjamuan, transportasi, bahan bakar, perjalanan dinas, belanja barang dan jasa lain, sewa gedung, sewa perlengkapan kantor dll.
- b. Kompensasi tenaga kerja, contoh : upah, gaji, lembur, honor, bonus dan tunjangan lainnya
- c. Penyusutan
- d. Pajak lainnya atas produksi (dikurangi subsidi), contoh: PBB, STNK, BBN dan lain-lain.

### iv. Penghitungan PK-LNPRT Tahunan

### 1. Sumber data

- Hasil Survei Khusus Lembaga Non-profit (SK-LNP).
  Informasi yang diperoleh dari hasil SKLNP adalah rata-rata pengeluaran menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran.
- ➤ Hasil *up-dating* direktori LNPRT.

  Informasi yang diperoleh dari hasil *up-dating* direktori LNPRT adalah jumlah populasi LNPRT menurut jenis lembaga.
- ➤ Indeks Harga Konsumen (IHK)

### 2. Metode penghitungan

PK-LNPRT diestimasi dengan menggunakan metode langsung, yaitu menggunakan hasil SKLNP. Tahapan estimasi PK-LNPRT adalah sebagai berikut :

 Menghitung rata-rata pengeluaran menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran (barang dan jasa). Barang dan jasa yang diperoleh secara cuma-cuma, nilainya diperkirakan sesuai harga pasar yang berlaku. Rata-rata pengeluaran lembaga menurut jenis-nya dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\overline{x}_{ij} = \frac{x_{ij}}{n_i}$$

 $x_{ii}$ : Rata-rata pengeluaran menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran

 $x_{ii}$ : PK-LNPRT hasil survei menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran

 $n_i$ : Jumlah sampel LNPRT menurut jenis lembaga

i: Jenis lembaga LNPRT, i = 1, 2, 3, ..., 7

j: jenis pengeluaran LNPRT, j = 1, 2, 3, ..., 19

• Mengestimasi PK-LNPRT, dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$X = \sum_{i=1}^{7} \sum_{i=1}^{19} \bar{x}_{ij} \times N_{i}$$

X: PK-LNPRT adh Berlaku

 $N_i$ : Populasi LNPRT menurut jenis lembaga

Dari hasil penghitungan tersebut akan diperoleh besarnya PK-LNPRT atas dasar harga berlaku (ADHB). PK-LNPRT atas dasar harga konstan (ADHK) 2010, diperoleh dengan cara mendeflate PK-LNPRT ADHB dengan IHK tahun dasar 2010.

### 2.3 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR PEMERINTAH

### i. Pendahuluan

Unit pemerintah adalah unit institusi yang dibentuk melalui proses politik, serta mempunyai kekuasaan di bidang lembaga legislatif, yudikatif maupun eksekutif atas unit institusi lain yang berada di dalam batas-batas wilayah suatu negara/wilayah. Pemerintah juga mempunyai berbagai peran dan fungsi lainnya, seperti sebagai penyedia barang dan jasa bagi

kelompok atau individu rumah tangga, sebagai pemungut dan pengelola pajak atau pendapatan lain-nya, berfungsi mendistribusikan pendapatan atau kesejahteraan melalui aktivitas transfer, serta terlibat di dalam produksi non-pasar.

Dalam suatu perekonomian, unit pemerintah bisa berperan sebagai konsumen maupun produsen, serta sebagai regulator yang menetapkan berbagai kebijakan di bidang fiskal dan moneter. Sebagai konsumen, pemerintah akan melakukan aktivitas konsumsi atas barang dan jasa akhir. Sedangkan sebagai produsen, pemerintah akan melakukan aktivitas memproduksi barang dan jasa maupun aktivitas investasi.

### ii. Konsep dan Definisi

Besarnya nilai pengeluaran konsumsi akhir pemerintah (PK-P) sama dengan nilai produksi barang dan jasa yang dihasilkan pemerintah untuk dikonsumsi pemerintah itu sendiri. PK-P mencakup pembelian barang dan jasa yang bersifat rutin, pembayaran upah dan gaji pegawai, transfer sosial dalam bentuk barang, perkiraan penyusutan barang modal, dan nilai output dari Bank Indonesia, dikurangi dengan nilai penjualan barang dan jasa yang dihasilkan unit produksi yang tak dapat dipisahkan dari aktivitas pemerintahan.

Aktivitas unit produksi pemerintah yang tidak dapat dipisahkan dari aktivitas pemerintahan secara umum, mencakup kegiatan sebagai berikut:

- 1. memproduksi barang yang sama atau sejenis dengan barang yang diproduksi oleh perusahaan. Contoh, aktivitas pencetakan publikasi, kartu pos, reproduksi karya seni, pembibitan tanaman di kebun percobaan dan sebagainya. Aktivitas menjual barangbarang semacam itu bersifat insidentil dari fungsi pokok unit pemerintah.
- 2. memproduksi jasa. Contoh, aktivitas penyelenggaraan rumah sakit, sekolah, perguruan tinggi, museum, perpustakaan, tempat rekreasi dan penyimpanan hasil karya seni yang dibiayai oleh pemerintah. Dalam hal ini pemerintah memungut biaya yang umumnya tidak lebih dari seluruh biaya yang dikeluarkan. Pendapatan yang diterima dari aktivitas semacam ini disebut sebagai penerimaan non-komoditi (pendapatan jasa).

### iii. Cakupan

Sektor pemerintahan terdiri dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam melakukan aktivitasnya, unit pemerintah pusat akan mengacu pada dokumen Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sedangkan unit pemerintah daerah (baik Provinsi, Kabupaten/Kota, maupun Desa) mengacu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah (APBD).

Pengeluaran konsumsi akhir pemerintah (PK-P) Provinsi mencakup: a. PK-Pemerintah Kabupaten/Kota yang berada di wilayah provinsi; b. PK-Pemerintah Provinsi yang bersangkutan; c. PK-Pemerintah Pusat yang merupakan bagian dari pemerintah Provinsi; d. PK-Pemerintah Desa/ Kelurahan/Nagari yang ada di wilayah Provinsi bersangkutan.

### iv. Penghitungan PDRB Tahunan

### 1. Sumber Data

Data dasar yang digunakan untuk menghitung PK-P Provinsi Tahunan adalah:

- a. Data realisasi APBN Tahunan (Kemenkeu)
- b. Data realisasi APBD Tahunan (Kemenkeu)
- c. Statistik Keuangan Daerah (BPS)
- d. Output Bank Indonesia (BI)
- e. Gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari Kementrian Keuangan serta Indeks Harga dari BPS.

### 2. Metode Penghitungan

a. PK-P Provinsi atas dasar harga berlaku (ADHB)Secara umum, PK-P ADHB dihitung menggunakan rumusan berikut :

### PK-P ADHB =

Output non pasar – penjualan barang dan jasa + output Bank Indonesia

Output **non-pasar dihitung** dengan pendekatan biaya yg dikeluarkan, yaitu : Belanja pengadaan barang/jasa, bantuan sosial dalam bentuk barang (yang dibeli dengan harga pasar ), belanja pegawai, dan penyusutan.

Untuk level Provinsi, PK-P Provinsi ADHB, dihitung berdasarkan penjumlahan dari pengeluaran akhir konsumsi pemerintah Provinsi itu sendiri + pengeluaran akhir konsumsi pemerintah seluruh pemerintahan Kabupaten/ Kota yang ada di wilayah Provinsi tersebut + pengeluaran akhir seluruh pemerintah

desa/kelurahan/nagari yang ada diwilayah provinsi tersebut + pengeluaran pemerintah pusat yang menjadi bagian dari Provinsi yang bersangkutan.

### b. PK-P Provinsi atas dasar harga konstan (ADHK)

Pengeluaran konsumsi pemerintah ADHK dihitung dengan menggunakan metode deflasi. Deflator yang digunakan adalah Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) umum tanpa ekspor, Indeks Upah, Indeks Implisit dari Produk Domestik Bruto komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto, Indeks Harga Konsumen (IHK) umum.

### 2.4 PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO

### i. Pendahuluan

Aktivitas investasi merupakan salah satu faktor utama yang akan mempengaruhi perkembangan ekonomi suatu negara/wilayah. Investasi disini terdiri dari investasi fisik dan investasi finansial. Dalam konteks PDB/PDRB, aktivitas investasi fisik ini tercermin pada komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan Perubahan Inventori.

PMTB erat kaitannya dengan keberadaan aset tetap (*fixed asset*) yang dilibatkan dalam proses produksi. Secara garis besar aset tetap dapat diklasifikasi menurut jenis barang modal seperti: bangunan dan konstruksi lain, mesin dan perlengkapan, kendaraan, tumbuhan, ternak, dan barang modal lainnya.

### ii. Konsep dan Definisi

PMTB didefinisikan sebagai penambahan dan pengurangan aset tetap pada suatu unit produksi, dalam kurun waktu tertentu. Penambahan barang modal mencakup pengadaan, pembuatan, pembelian, sewa beli (financial leasing) barang modal baru dari dalam negeri serta barang modal baru dan bekas dari luar negeri (termasuk perbaikan besar, transfer atau barter barang modal), dan pertumbuhan aset sumberdaya hayati yang dibudidaya. Sedangkan pengurangan barang modal mencakup penjualan, transfer atau barter, dan sewa beli (financial leasing) barang modal bekas pada pihak lain. Pengecualian kehilangan yang disebabkan oleh bencana alam tidak dicatat sebagai pengurangan.

Barang modal mempunyai usia pakai lebih dari satu tahun, serta akan mengalami penyusutan sepanjang usia pakainya. Istilah "bruto" mengindikasikan bahwa di dalamnya

masih mengandung unsur penyusutan. Penyusutan atau konsumsi barang modal (*Consumption of Fixed Capital*) menggambarkan penurunan nilai barang modal yang digunakan dalam proses produksi secara normal selama satu periode.

### iii. Cakupan

### PMTB terdiri dari:

- 1. Penambahan dikurangi pengurangan aset (harta) baik barang baru maupun barang bekas, seperti bangunan tempat tinggal, bangunan bukan tempat tinggal, bangunan lainnya, mesin & perlengkapan, alat transportasi, aset tumbuhan dan hewan yang dibudidaya (*cultivated asset*), produk kekayaan intelektual (*intellectual property products*), dan sebagainya;
- 2. Biaya alih kepemilikan aset non-finansial yang tidak diproduksi, seperti lahan dan aset yang dipatenkan;
- 3. Perbaikan besar aset, yang bertujuan meningkatkan kapasitas produksi dan usia pakainya (seperti overhaul mesin produksi, reklamasi pantai, pembukaan, pengeringan dan pengairan hutan, serta pencegahan banjir dan erosi).

### iv. Penghitungan PMTB Tahunan

### 1. Sumber data

- a. Output industri konstruksi hasil penghitungan PDRB menurut industri konstruksi dari BPS Prov/Kab/Kota.
- b. Nilai impor 2 digit HS, yang merupakan barang modal impor dari KPPBC (Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai) setempat.
- c. Indeks Produksi Industri Besar Sedang dari Statistik Industri Kecil & Rumah tangga (level provinsi).
- d. Laporan keuangan perusahaan.
- e. Publikasi Statistik Industri Besar dan Sedang level provinsi.
- f. IHPB dari Statistik Harga Perdagangan Besar.
- g. Publikasi Statistik Pertambangan dan Penggalian (migas dan non-migas).
- h. Publikasi Statistik Listrik, Gas & Air Minum.
- Publikasi Statistik Konstruksi.

- j. Data Eksplorasi Mineral dari Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
- k. Statistik Peternakan, Ditjen Peternakan.

### 2. Metode penghitungan

Penghitungan PMTB dapat dilakukan melalui metode langsung maupun tidak langsung, tergantung pada ketersediaan data yang mungkin diperoleh di wilayah masing-masing. Pendekatan "langsung" adalah dengan cara menghitung pembentukan modal (harta tetap) yang dilakukan oleh berbagai sektor ekonomi (produsen) secara langsung. Sedangkan pendekatan "tidak langsung" adalah dengan menghitung berdasarkan alokasi dari total penyediaan produk (barang dan jasa) yang menjadi barang modal di berbagai industri, atau disebut sebagai pendekatan "arus komoditas". Dalam hal ini penyediaan atau "supply" dari barang modal dapat berasal dari produksi dalam negeri (domestik) maupun dari produk luar negeri (impor).

### Pendekatan Langsung

Penghitungan PMTB secara langsung dilakukan dengan cara menjumlahkan seluruh nilai PMTB yang terjadi di setiap industri (lapangan usaha). Barang modal tersebut dinilai atas dasar harga (adh) pembelian, di dalamnya sudah termasuk biaya-biaya yang dikeluarkan, seperti biaya transportasi, biaya instalasi, pajak-pajak, serta biaya lain yang terkait dengan pengadaan barang modal tersebut. Bagi barang modal yang berasal dari impor di dalamnya termasuk bea masuk dan pajak-pajak yang terkait dengan pengadaan atau alih kepemilikan barang modal tersebut.

Pada dasarnya data untuk penghitungan PMTB secara langsung dapat diperoleh dari laporan keuangan perusahaan. Data yang tersedia meliputi informasi/data tentang perubahan atas aset tetap (PMTB) yang dinilai adh berlaku atau harga pembelian (perolehan). Untuk memperoleh nilai PMTB adh Konstan, maka PMTB adh Berlaku tersebut di "deflate" (dibagi) dengan indeks harga perdagangan besar (IHPB) yang sesuai dengan kelompok barang modal.

### Pendekatan Tidak Langsung

Penghitungan PMTB dengan cara tidak langsung, disebut sebagai pendekatan arus komoditas (commodity flow approach). Pendekatan ini dilakukan dengan cara menghitung nilai penyediaan produk barang yang dihasilkan oleh berbagai industri (supply), yang kemudian sebagian di antaranya dialokasi menjadi barang modal. Penghitungan PMTB dalam bentuk bangunan, dilakukan dengan menggunakan rasio tertentu dari nilai output industri konstruksi, baik adh Berlaku maupun adh Konstan.

Penghitungan PMTB dalam bentuk mesin, alat angkutan dan barang modal lainnya dibedakan atas barang modal yang berasal dari produksi domestik, dan yang berasal dari impor. Untuk barang modal domestik, dapat diperoleh dengan dua cara. Pertama, dengan mengalokasi output mesin, alat angkutan dan barang modal lain yang menjadi pembentukan modal. Nilai tersebut masih harus ditambah dengan biaya angkut dan margin perdagangan, sehingga diperoleh PMTB adh Berlaku. Untuk memperoleh nilai atas dasar harga konstan adalah dengan men-*deflate* PMTB (adh Berlaku) dengan IHPB yang sesuai dengan jenis barang modal.

Pendekatan ke dua, yang harus dilakukan bila data output tidak tersedia adalah dengan cara "ekstrapolasi" atau mengalikan PMTB adh Konstan dengan indeks produksi jenis barang modal yang sesuai. Untuk itu penghitungan PMTB diawali dengan menghitung PMTB adh Konstan terlebih dahulu. Selanjutnya untuk memperoleh PMTB adh Berlaku, nilai PMTB adh Konstan tersebut di "inflate" (dikalikan) dengan indeks harga masing-masing jenis barang modal yang sesuai (sebagai inflator). Hal ini mensyaratkan bahwa PMTB adh Konstan di tahuntahun sebelumnya sudah tersedia secara lengkap.

Penghitungan PMTB dalam bentuk mesin, alat angkutan dan barang modal lain yang berasal dari impor, dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) cara.

Pertama, PMTB adh Berlaku diperoleh dari total nilai barang impor. Selanjutnya, barang modal tersebut dirinci menurut kelompok utama seperti mesinmesin, alat angkutan dan barang modal lain. Apabila rician tersebut tidak tersedia dapat digunakan rasio tertentu sebagai alokator (barang modal impor kode HS 2

digit). *Ke dua*, untuk memperoleh PMTB adh Konstan adalah dengan cara men"deflate" PMTB adh Berlaku dengan menggunakan indeks harga yang sesuai.

PMTB adh Berlaku untuk barang modal tak-berwujud seperti eksplorasi mineral, dihitung dengan cara mengumpulkan data laporan keuangan perusahaan terbuka di bidang industri pertambangan. Dengan menggunakan data panel, pertumbuhan adh Berlaku dari aktivitas pertambangan itu menjadi pengali nilai eksplorasi mineral pada periode sebelumnya. Sedangkan PMTB adh Konstan-nya diperoleh dengan men-deflate nilai adh Berlaku dengan indeks implisit dari PDRB industri pertambangan. Selain itu, data dari ESDM dan BP Migas diharapkan menjadi dasar atau data kontrol untuk data tahunan-nya.

Untuk perangkat lunak, PMTB adh Berlaku diperoleh dengan cara mengumpulkan data laporan keuangan perusahaan terbuka di bidang *software*. Untuk adh Konstan diperoleh dengan men-deflate nilai adh Berlaku dengan indeks implisit industri jasa perusahaan.

Penghitungan PMTB hasil karya hiburan, sastra, dan seni original (entertainment, literary, or artistic original products), data dikumpulkan adalah nilai sinetron dan program acara televisi yang dapat dibuat. Sedangkan data Impor film diperoleh dari nilai impor film. PMTB adh Konstan-nya diperoleh dengan cara mendeflate nilai adh Berlaku dengan indeks implisit industri jasa hiburan dan IHPB barang impor.

Terdapat beberapa permasalahan yang terjadi dalam penghitungan PMTB melalui pendekatan tak-langsung (arus komoditas), yaitu:

- a. Rasio penggunaan output industri yang menjadi barang modal cenderung statis. Untuk memperbaiki diperlukan survei dalam skala yang besar.
- b. Nilai margin perdagangan dan angkutan (*Transport and Trade Margin*) sulit diperoleh.
- c. Selang (*Lag*) waktu antara data tahun pengukuran (referensi) dengan data publikasi yang diperoleh dari sumber data tertentu, terlalu lama.

### 2.5 PERUBAHAN INVENTORI

### i. Pendahuluan

Dalam aktivitas ekonomi, inventori berfungsi sebagai salah satu komponen yang dibutuhkan untuk keberlangsungan proses produksi, di samping tenaga kerja dan barang modal.

Dalam PDB/PDRB, komponen Perubahan Inventori merupakan bagian dari Pembentukan Modal Bruto, atau yang lebih dikenal sebagai investasi fisik yang terjadi pada kurun waktu tertentu di dalam suatu wilayah. Perubahan inventori menggambarkan bagian dari investasi yang direalisasikan dalam bentuk barang jadi, barang setengah jadi, serta bahan baku dan bahan penolong pada satu periode tertentu. Ketersediaan data perubahan inventori menjadi penting untuk memenuhi kebutuhan analisis tentang aktivitas investasi.

### ii. Konsep dan definisi

Pengertian sederhana dari inventori (persediaan) adalah barang yang dikuasai oleh produsen untuk tujuan diolah lebih lanjut (*intermediate consumption*) menjadi barang dalam bentuk lain, yang punya nilai ekonomi maupun nilai manfaat yang lebih tinggi. Termasuk dalam pengertian ini adalah barang yang masih dalam proses pengerjaan (*work in progress*), serta barang jadi yang belum dipasarkan dan masih dikuasai oleh pihak produsen.

Perubahan inventori adalah selisih antara nilai inventori pada akhir periode akuntansi dengan nilai inventori pada awal periode akuntansi. Perubahan inventori menjelaskan tentang perubahan posisi barang inventori, yang dapat bermakna pertambahan (tanda positif) atau pengurangan (bertanda negatif).

Bagi produsen, keberadaan inventori diperlukan untuk menjaga kelangsungan proses produksi, sehingga perlu pencadangan baik dalam bentuk bahan baku atau bahan penolong. Ketidakpastian yang disebabkan pengaruh eksternal juga menjadi faktor pertimbangan bagi pengusaha untuk melakukan pencadangan (khususnya bahan baku). Bagi pedagang, pengadaan inventori lebih dipengaruhi oleh unsur spekulatif dengan harapan untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar. Sedangkan bagi pemerintah, kebijakan pencadangan khususnya komoditas strategis utamanya ditujukan untuk menjaga stabilitas ekonomi, politik dan sosial. Karena menyangkut kepentingan masyarakat luas (publik), maka perlu ada pencadangan untuk beberapa komoditas bahan pokok seperti beras, terigu, minyak

goreng dan gula pasir. Bagi rumah tangga pengadaan inventori lebih ditujukan untuk kemudahan dalam mengatur perilaku konsumsi.

### iii. Cakupan

Inventori dapat diklasifikasikan menurut jenis barang adalah sebagai berikut:

- a. Inventori menurut industri, seperti produk atau hasil perkebunan, kehutanan, perikanan, pertambangan, industri pengolahan, gas kota, air bersih, serta konstruksi;
- b. Berbagai jenis bahan baku & penolong (*material & supplies*), yaitu semua bahan, komponen atau persediaan untuk diproses lebih lanjut menjadi barang jadi;
- c. Barang jadi, yaitu barang yang telah diproses tetapi belum terjual atau belum digunakan, termasuk barang yang dijual dalam bentuk yang sama seperti pada waktu dibeli;
- d. Barang setengah jadi, yaitu barang-barang yang sebagian telah diolah atau belum selesai (tidak termasuk konstruksi yang belum selesai).
- e. Barang dagangan yang masih dikuasai oleh pedagang besar maupun pedagang eceran untuk tujuan dijual;
- f. Ternak untuk tujuan dipotong;
- g. Pengadaan barang oleh pedagang untuk tujuan dijual atau dipakai sebagai bahan bakar atau persediaan; dan
- h. Persediaan pada pemerintah, yang mencakup barang strategis seperti beras, kedelai, gula pasir, dan gandum.

### iv. Penghitungan Perubahan Inventori Tahunan

1. Sumber data

Sumber data yang digunakan untuk penghitungan komponen perubahan inventori adalah:

- Laporan keuangan perusahaan-perusahaan terkait dari survei atau dari mengunduh *website* Bursa Efek Indonesia (<u>www.idx.co.id</u>);
- Laporan Keuangan Perusahaan BUMN/BUMD
- Data komoditas pertambangan dari publikasi statistik pertambangan dan penggalian;
- Data Inventori Publikasi Tahunan Industri Besar Sedang.

- Data komoditas perkebunan;
- Indeks harga implisit PDRB industri terpilih, dan
- Indeks harga perdagangan besar (IHPB) terpilih.
- Data eksternal lain, seperti data persediaan beras dari Bulog, data semen dari Asosiasi Semen Indonesia (ASI), gula dari Dewan Gula Indonesia (DGI), dan ternak dari Ditjennak Kementan.

### 2. Metode Penghitungan

Terdapat 2 metode yang digunakan dalam penghitungan komponen perubahan inventori, yaitu pendekatan langsung dan pendekatan tidak langsung. Pendekatan langsung adalah pendekatan dari sisi "korporasi", sedangkan pendekatan tidak langsung adalah pendekatan dari sisi "komoditas".

Di lihat dari sisi manfaat-nya, pendekatan secara langsung menghasilkan data yang relatif lebih baik dibanding dengan pendekatan tidak langsung. Pendekatan komoditas hanya dapat dilakukan jika data posisi inventori tersedia secara rinci dan berkesinambungan.

### Pendekatan Langsung

Dengan menggunakan pendekatan langsung, akan diperoleh nilai posisi inventori di suatu waktu tertentu (umumnya di akhir tahun). Sumber data utama adalah laporan neraca akhir tahun (*balance sheet*) perusahaan. Untuk memperoleh nilai perubahan inventori adh berlaku, diperlukan data inventori di tahun yang berurutan. Langkah penghitungan inventori dari laporan keuangan, sebagai berikut:

- menghitung posisi inventori adh Konstan, dengan cara mendeflate stok awal dan akhir dengan IHPB akhir tahun;
- menghitung perubahan inventori adh Konstan dengan mengurangkan posisi di tahun berjalan dengan di tahun sebelumnya; dan
- menghitung perubahan inventori adh Berlaku dengan meng*inflate* perubahan inventori adh Konstan dengan IHPB rata-rata tahunan.

### Pendekatan Tidak Langsung

Pendekatan tidak langsung disebut juga dengan pendekatan arus komoditas (commodity flow). Data utama yang digunakan adalah data volume dan harga masingmasing barang inventori. Nilai perubahan barang inventori adh Berlaku diperoleh dengan cara menghitung perubahan volume stok akhir dan stok awal dikalikan rata-

rata harga pembelian, atau harga penjualan bila data harga pembelian tidak tersedia. Perubahan barang inventori adh Konstan dihitung dengan: a. men*deflate* nilai perubahan inventori adh Berlaku dengan indeks harga yang sesuai, b. mengalikan perubahan volume stok akhir dan stok awal dikalikan dengan harga barang di tahun dasar.

Keterbatasan dan masalah yang dihadapi di dalam menghitung komponen Perubahan Inventori adalah bahwa :

- Data inventori yang dibutuhkan adalah dalam bentuk posisi atau pada satu saat untuk periode waktu yang berurutan;
- Tidak seluruh komoditas inventori tersedia data volume dan harga-nya;
- Data perubahan inventori yang tersedia dalam bentuk volume umumnya tidak disertai data harganya. Jika data harga inventori tidak tersedia, maka dapat diasumsikan indeks harga komoditas inventori mengikuti indeks implisit PDRB yang sesuai;
- Diperlukan *adjustment* dengan cara me-*mark-up*, guna untuk melengkapi estimasi untuk industri yang datanya tidak tersedia;

### 2.6 EKSPOR DAN IMPOR

### i. Pendahuluan

Aktivitas ekspor-impor dalam suatu wilayah diyakini telah terjadi sejak lama, bahkan sebelum wilayah itu ditetapkan sebagai wilayah pemerintah. Ragam barang dan jasa yang diproduksi serta disparitas harga, menjadi faktor utama munculnya aktivitas ekspor impor. Daerah yang tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri berusaha mendatangkan dari daerah atau bahkan negara lain. Di sisi lain, daerah yang memproduksi barang dan jasa melebihi dari kebutuhan domestik, terdorong untuk memperluas pasar ke luar daerah atau bahkan ke luar negeri.

Seiring perkembangan zaman, aktivitas produksi dan permintaan masyarakat atas barang dan jasa semakin meningkat dan beragam. Kemajuan di bidang transportasi dan komunikasi juga turut memperlancar arus distribusi barang dan jasa. Kondisi tersebut semakin mendorong aktivitas ekspor-impor di suatu wilayah menjadi semakin berkembang.

### ii. Konsep dan definisi

Ekspor-impor di suatu wilayah didefiniskan sebagai alih kepemilikan ekonomi (baik penjualan/pembelian, barter, hadiah ataupun hibah) atas barang dan jasa antara residen wilayah tersebut dengan non-residen yang berada di luar wilayah tersebut.

### iii. Cakupan

Ekspor-Impor pada suatu wilayah terdiri dari:

- a. Ekspor/impor barang dari/ke Luar Negeri ke/dari provinsi tersebut
- Ekspor/impor jasa dari/ke Luar Negeri ke/dari provinsi tersebut,
   meliputi jasa pengangkutan, asuransi, komunikasi, pariwisata, dan jasa lainnya,
- c. Net Ekspor antar daerah, yaitu Ekspor antar daerah dan Impor antar daerah.

### iv. Penghitungsn Ekspor-Impor Tahunan

- 1. Sumber data
  - b. Data Statistik Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dari BPS (dalam US\$)
  - c. Data Statistik Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dari BPS (dalam US\$)
  - d. Neraca Pembayaran Indonesia dari BI
  - e. Laporan Simopel, yaitu laporan (bulanan) bongkar muat barang di pelabuhan;
  - f. Informasi lalu-lintas barang yang keluar-masuk provinsi di jembatan timbang;
  - g. Informasi lalu-lintas barang yang keluar-masuk provinsi dari hasil survei.
  - h. Kurs transaksi rata-rata tertimbang dari Bank Indonesia

### 2. Metode Penghitungan

Ekspor-Impor barang luar negeri dinilai menurut harga free on board (fob) dalam US\$. Penghitungan ekspor barang luar negeri dilakukan dengan mengalikan nilai barang (sesuai PEB) dengan kurs transaksi beli rata-rata tertimbang. Sedangkan Impor barang luar negeri dilakukan dengan mengalikan nilai barang (sesuai PIB) dengan kurs transaksi jual rata-rata tertimbang. Nilai ekspor-impor jasa berasal dari Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Disamping itu nilai ekspor-impor tersebut masih ditambah/dikurangi dengan nilai pembelian langsung (direct purchase) dan transaski yang tidak terdokumentasi (undocumented trasnsaction) baik oleh residen maupun non residen. Sedangkan net ekspor antar wilayah merupakan nilai sisa (residu) antara PDRB lapangan usaha dengan PDRB pengeluaran.

Jennbandkota.hps.do.id

# BAB III

TINJAUAN PEREKONOMIAN KOTA PALEMBANG BERDASARKAN PDRB PENGELUARAN KOTA PALEMBANG 2013-2017 Faktor internal dan eksternal adalah dua faktor yang mempengaruhi perubahan struktur ekonomi Kota Palembang akibat proses pembangunan ekonomi yang terjadi pada periode 2013 s.d 2017. Faktor internal dipengaruhi oleh perkembangan maupun perubahan perilaku masing-masing komponen pengeluaran akhir. Faktor eksternal lebih dipengaruhi oleh perubahan teknologi dan struktur perdagangan global sebagai akibat peningkatan perdagangan internasional.

Data yang ada menunjukkan bahwa setiap komponen pengeluaran mempunyai perilaku yang berbeda sesuai dengan tujuannya. Sebagian besar produk atau barang dan jasa yang tersedia di wilayah domestik Kota Palembang digunakan untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir (rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah). Sebagian lagi digunakan untuk investasi fisik (dalam bentuk PMTB dan perubahan inventori). Untuk lebih jelasnya, perilaku masing-masing komponen pengeluaran itu akan diuraikan pada bagian berikut.

# 3.1 TINJAUAN AGREGAT PDRB KOTA PALEMBANG MENURUT PENGELUARAN

Tabel 1. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kota Palembang Tahun 2013-2017

(Miliar Rp)

Komponen Pengeluaran	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	58 204,18	64 974,93	70 668,39	77 173,94	81 156,62
2. Konsumsi LNPRT	1 118,31	1 362,12	1 465,91	1 547,95	1 600,76
3. Konsumsi Pemerintah	5 372,46	5 495,00	5 934,52	5 796,23	7 282,70
4. PMTB	47 596,27	51 775,12	51 201,54	56 418,73	61 601,04
5. Perubahan Inventori	(1 127,88)	1 936,62	(1 382,44)	(2 327,70)	(3 313,99)
6. Ekspor	21 355,61	20 168,20	22 546,86	22 569,11	27 135,45
7. Impor	47 325,63	50 639,10	42 190,83	42 462,65	45 046,88
Total PDRB	85 193,32	95 072,89	108 243,95	118 715,62	130 415,69

Kondisi perekonomian Kota Palembang menunjukkan tanda pemulihan setelah berlalunya masa krisis yang melanda ekonomi dunia sejak tahun 2008. Hal ini terlihat dari PDRB yang terus meningkat dan pertumbuhan ekonomi yang terus menunjukkan arah positif.

Peningkatan ekonomi tersebut digambarkan melalui Nilai PDRB ADHB dan ADHK serta pertumbuhan pada total PDRB.

Nilai PDRB Kota Palembang (adh Berlaku) selama periode tahun 2013 s.d 2017 menunjukkan peningkatan signifikan dari tahun ke tahun. Peningkatan nilai tersebut dipengaruhi oleh adanya perubahan harga dan juga perubahan volume.

Tabel 2. PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Kota Palembang Tahun 2013-2017

(Milyar Rp)

Komponen Pengeluaran	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	49 896,98	52 850,01	55 262,59	57 891,60	59 440,01
2. Konsumsi LNPRT	931,10	1 085,65	1 161,83	1 213,87	1 224,77
3. Konsumsi Pemerintah	4 411,54	4 486,09	4 720,68	4 352,06	4 931,45
4. PMTB	34 687,63	37 320,60	37 918,39	41 067,17	44 772,87
5. Perubahan Inventori	(2 291,11)	221,11	(601,59)	(1 514,07)	(1 923,72)
6. Ekspor	20 330,82	23 309,51	22 005,21	20 525,42	24 634,89
7.Impor	33 773,58	41 181,90	38 122,04	36 447,70	40 625,50
Total PDRB	74 193,37	78 091,09	82 345,07	87 088,35	92 454,78

Selain dinilai atas dasar harga (adh) Berlaku, PDRB menurut pengeluaran juga dinilai adh Konstan 2010 atau adh berbagai produk yang dinilai dengan harga pada tahun 2010. Melalui pendekatan penghitungan adh konstan, PDRB dapat memberikan gambaran tentang perubahan PDRB secara volume atau secara kuantitas saja (tanpa ada pengaruh perubahan harga). PDRB komponen pengeluaran adh Konstan menggambarkan perubahan atau pertumbuhan ekonomi secara riil, utamanya berkaitan dengan peningkatan volume konsumsi akhir. Selama kurun waktu 2013-2017 gambaran tentang perkembangan ekonomi Kota Palembang berdasarkan PDRB adh Konstan dapat dilihat pada Tabel 2 diatas. Sama halnya dengan PDRB adh Berlaku seluruh komponen pengeluaran akhir PDRB adh Konstan juga menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun.



Grafik 1. Perbandingan PDRB adh Berlaku dan adh Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Kota Palembang Tahun 2013 – 2017

Dari grafik di atas nampak bahwa pada umumnya nilai PDRB adh Berlaku selalu lebih besar dari nilai PDRB adh Konstan. Perbedaan tersebut disebabkan karena ada pengaruh perubahan harga dalam perhitungan PDRB adh Berlaku. Dalam penghitungan PDRB adh Konstan pengaruh faktor harga telah ditiadakan.

Terbentuknya keseluruhan PDRB atau total PDRB merupakan kontribusi dari semua komponen pengeluarannnya yang terdiri dari konsumsi akhir rumah tangga (PK-RT), konsumsi akhir LNPRT (PK-LNPRT), konsumsi akhir pemerintah (PK-P), pembentukan modal tetap bruto (PMTB), dan ekspor neto (E) atau ekspor dikurangi impor.

Berdasarkan Tabel 3 diatas terlihat bahwa selama periode 2013 – 2017 produk yang dikonsumsi di wilayah domestik sebagian besar masih untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir rumah tangga (di atas 60 persen). Proporsi konsumsi akhir pemerintah berada pada rentang 4 – 6 persen. Hal ini menunjukkan bahwa peran pemerintah dalam menyerap produk domestik tidak terlalu besar. Sementara itu, pengeluaran untuk kapital (PMTB) juga mempunyai peran yang cukup besar dengan kontribusi sekitar 45 s.d 55 persen. Peran relatif besar ini dikarenakan Kota Palembang sedang giat melakukan pembangunan, selain untuk perkembangan wilayahnya sebagai kota industri, begitu pula peran Kota Palembang sebagai tuan rumah didalam melaksanakan berbagai kegiatan baik nasional maupun internasional.

Tabel 3. Distribusi PDRB ADHB Menurut Pengeluaran Kota Palembang Tahun 2013 – 2017

Komponen Pengeluaran	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	68,32	68,34	65,29	65,01	62,23
2. Konsumsi LNPRT	1,31	1,43	1,35	1,30	1,23
3. Konsumsi Pemerintah	6,31	5,78	5,48	4,88	5,58
4. PMTB	55,87	54,46	47,30	47,52	47,23
5. Perubahan Inventori	(1,32)	2,04	(1,28)	(1,96)	(2,54)
6. Ekspor	25,07	21,21	20,83	19,01	20,81
7. Impor	55,55	53,26	38,98	35,77	34,54
Total PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ekspor mempunyai peran sekitar 19 s.d 25 persen. Hal ini menunjukkan bahwa Kota Palembang mampu memasarkan produksi ke luar daerah. Demikian halnya impor, sekitar 34 s.d 55 persen permintaan domestik masih dipenuhi oleh produk dari impor, baik impor dari luar negeri maupun luar provinsi. Di sisi lain, pada tahun 2013 - 2017 perdagangan luar Kota Palembang yang direpresentasikan oleh transaksi ekspor dan impor, menunjukkan bahwa nilai impor Kota Palembang cenderung lebih tinggi dari nilai ekspor.

Agregat makro lain yang dapat diturunkan dari data PDRB adalah pertumbuhan riil PDRB atau lebih dikenal dengan pertumbuhan ekonomi (*economic growth*), yang menggambarkan kinerja pembangunan di bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Kota Palembang dari tahun 2013 s.d 2017 secara rata-rata mencapai 5,69 persen. Pertumbuhan ekonomi Palembang dalam periode tersebut masing-msing tumbuh 5,85 persen (2013); 5,25 persen (2014); 5,45 persen (2015); 5,76 persen (2016) dan 6,16 persen (2017). Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2017 yakni sebesar 6,16 persen dan terendah terjadi pada tahun 2014 yaitu sebesar 5,25 persen.

Tabel 4. Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Menurut Pengeluaran Kota Palembang Tahun 2013 - 2017

					(rersen)
Komponen Pengeluaran	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	6,73	5,92	4,56	4,76	2,67
2. Konsumsi LNPRT	8,74	16,60	7,02	4,48	0,90
3. Konsumsi Pemerintah	5,08	1,69	5,23	-7,81	13,31
4. PMTB	6,15	7,59	1,60	8,30	9,02
5. Perubahan Inventori	-178,32	-109,65	-372,08	151,68	27,06
6. Ekspor	17,37	14,65	-5,60	-6,72	20,02
7. Impor	-2,50	21,94	-7,43	-4,39	11,46
Total PDRB	5,85	5,25	5,45	5,76	6,16

Sementara itu indeks implisit<sup>1</sup> PDRB yang menggambarkan tingkat perubahan harga yang terjadi pada sisi konsumen baik konsumen akhir (rumah tangga, LNPRT dan pemerintahan) maupun konsumen lainnya (perusahaan dan luar negeri), juga menunjukkan peningkatan. Indeks Implisit Kota Palembang dari tahun 2013 s.d 2017 secara berturut-turut sebesar 114,83 persen (2013); 121,75 persen (2014); 131,45 persen (2015); 136,32 persen (2016); dan 141,06 persen (2017).

Tabel 5. Indeks Implisit PDRB Menurut Pengeluaran Kota Palembang Tahun 2013 - 2017

Komponen Pengeluaran	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	116,65	122,94	127,88	133,31	136,54
2. Konsumsi LNPRT	120,11	125,47	126,17	127,52	130,70
3. Konsumsi Pemerintah	121,78	122,49	125,71	133,18	147,68
4. PMTB	137,21	138,73	135,03	137,38	137,59
5. Perubahan Inventori	49,23	875,86	229,80	153,74	172,27
6. Ekspor	105,04	86,52	102,46	109,96	110,15
7. Impor	140,13	122,96	110,67	116,50	110,88
Total PDRB	114,83	121,75	131,45	136,32	141,06

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Indeks perkembangan

# 3.2 PERKEMBANGAN KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA

Konsumsi akhir rumah tangga menempati porsi terbesar dalam PDRB menurut pengeluaran. Data berikut menunjukkan hal tersebut dimana sebagian besar produk domestik dan produk impor digunakan untuk memenuhi konsumsi akhir rumah tangga.

Pada kurun waktu 2013 – 2017 konsumsi akhir rumah tangga mengalami peningkatan signifikan baik dalam nominal (adh Berlaku) maupun riil (adh Konstan), sejalan dengan kenaikan jumlah penduduk maupun jumlah rumah tangga. Kenaikan jumlah penduduk mendorong terjadinya kenaikan nilai konsumsi rumah tangga, yang pada gilirannya akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Porsi pengeluaran konsumsi rumah tangga terhadap PDRB pada periode tahun 2013 sampai dengan 2017 cukup besar. Porsi tersebut berkisar antara 62 s.d 68 persen pada tahun 2013 hingga 2017. Porsi tertinggi terjadi pada tahun 2014 yaitu 68,34 persen dan terendah terjadi pada tahun 2017 yaitu 62,23 persen.

Masa pemulihan ekonomi telah mendorong rumah tangga untuk memperbaiki serta mengembalikan perilaku dan kebiasaan konsumsinya setelah sekian lama mengalami masamasa krisis. Melimpahnya penawaran dan persediaan berbagai jenis barang dan jasa di pasar domestik (termasuk yang berasal dari impor) turut menjadi pemicu meningkatnya belanja untuk konsumsi termasuk konsumsi rumah tangga. Namun, setelah pencapaian titik tertinggi pada tahun 2014, peranan konsumsi rumahtangga terus mengalami penurunan hingga mencapai 62,23 persen pada tahun 2017.

Secara umum rata-rata konsumsi per rumah tangga terus meningkat dari tahun ke tahun baik menurut adh Berlaku maupun adh Konstan 2010. Pada tahun 2013, secara umum setiap rumah tangga di Kota Palembang menghabiskan dana sekitar 167.730,55 ribu rupiah setahun untuk membiayai konsumsi baik dalam bentuk makanan maupun bukan makanan (sandang perumahan pendidikan dsb). Pengeluaran ini terus meningkat menjadi 221.468,32 ribu rupiah pada tahun 2017.

Tabel 6. Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kota Palembang Tahun 2013 – 2017

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi Rumah Tangga					
a. ADHB (Miliar Rp)	58 204,18	64 974,93	70 668,39	77 173,94	81 156,62
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	49 896,98	52 850,01	55 262,59	57 891,60	59 440,01
Proporsi Terhadap PDRB (% ADHB)	68,32	68,34	65,29	65,01	62,23
Rata-rata konsumsi per- Rumah Tangga/Tahun (Ribu Rp)			.3.08		
a. ADHB	167 730,55	184 531,77	198 042,77	213 365,10	221 468,32
b. ADHK 2010	143 791,18	150 096,46	154 869,20	160 054,63	162 205,87
Rata-rata Konsumsi per- Kapita/Tahun ( <i>Ribu Rp</i> )		WO.			
a. ADHB	37 894,92	41 690,84	44 652,31	48 052,68	49 816,54
b. ADHK 2010	32 486,36	33 910,95	34 918,05	36 046,45	36 486,19
Pertumbuhan <sup>2</sup>					
a. Total Konsumsi RT	6.73	5.92	4.56	4.76	2.67
b. Per-RT	5.17	4.39	3.18	3.35	1.34
c. Per-Kapita	5.17	4.39	2.97	3.23	1.22
Jumlah RT (unit)	347 010	352 107	356 834	361 699	366 448
Jumlah Penduduk (000 org)	1 536	1 558	1 583	1 606	1 629

Sementara itu, pada perkiraan adh Konstan 2010, rata-rata konsumsi rumah tangga per rumah tangga tumbuh pada kisaran 1,34 persen dengan pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2013 yaitu sebesar 5,17 persen. Di sisi lain, rata-rata konsumsi per-kapita juga menunjukkan perkembangan yang searah dengan kenaikan jumlah penduduk, dan selalu diikuti pula oleh kenaikan nilai konsumsinya. Pertumbuhan rata-rata konsumsi per-kapita menunjukkan peningkatan, baik adh Berlaku maupun adh Konstan 2010. Kondisi ini menunjukkan bahwa rata-rata konsumsi setiap penduduk di Kota Palembang meningkat, baik secara kuantitas (*volume*) maupun secara nilai sampai tahun 2016, sedangkan pada tahun 2017 rata-rata konsumsi rumahtangga per kapita mengalami penurunan.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Diturunkan dari perhitungan PDRB (atas dasar harga konstan/ADHK 2010)

Pertumbuhan rata-rata konsumsi per-kapita secara "riil" berkisar antara 1,22 sampai dengan 5,17 persen. Setiap perubahan pada konsumsi rumahtangga per-kapita secara otomatis berpengaruh terhadap perubahan struktur konsumsi rumahtangga.

Tabel 7. Struktur Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kota Palembang Tahun 2013–2017<sup>3</sup>

(Persen)

						(Persen)
	Kelompok Konsumsi	2013	2014	2015	2016	2017
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
a.	Makanan Minuman dan	48,81	49,27	47,16	47,08	46,72
	Rokok					
b.	Pakaian dan Alas Kaki	4,85	4,81	5,05	5,01	5,00
c.	Perumahan Perkakas Perleng-	10,07	9,75	10,39	10,24	10,12
	kapan dan Penyelenggaraan					
	Rumah Tangga					
d.	Kesehatan & Pendidikan	7,40	7,03	7,38	7,46	7,54
		1700	10.05	40.0	10.50	10.00
e.	Transportasi Komunikasi	17,06	18,25	18,87	18,78	18,99
	Rekreasi dan Budaya					
f.	Hotel & Restoran	8,32	7,89	8,10	8,38	8,52
	T. Commission	2.40	2.00	2.04	2.04	2.12
g.	Lainnya	3,49	3,00	3,04	3,04	3,12
	Total Konsumsi	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Secara total, pertumbuhan konsumsi rumah tangga adh Konstan sebesar 6,73 persen pada tahun 2013. Kemudian menurun pada tahun-tahun berikutnya dimana hanya tumbuh 2,67 persen pada tahun 2017. Sementara itu konsumsi per-kapita menurun dari 5,17 persen di tahun 2013 menjadi 1,22 persen pada tahun 2017. Nampak bahwa peningkatan keseluruhan konsumsi rumah tangga secara "riil" lebih tinggi dari peningkatan jumlah penduduk yang umumnya berada di bawah 2 persen dan ini mengindikasikan terjadi perubahan tingkat kemakmuran masyarakat.

Secara rata-rata dari tahun 2013 s.d 2017 nampak pada struktur konsumsi akhir rumah tangga Kota Palembang, bahwa konsumsi makanan lebih tinggi dibandingkan konsumsi bukan makanan. Proporsi pengeluaran untuk makanan cenderung masih berada pada kisaran 46-49 persen terhadap seluruh pengeluaran konsumsi rumahtangga di Kota Palembang.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Diturunkan dari perhitungan PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB)

Pola proporsi konsumsi di atas, menunjukkan tarik menarik antara kebutuhan rumah tangga atas makanan dan non makanan yang masih cukup kuat. Sungguhpun demikian, pengeluaran untuk kebutuhan non-makanan menjadi semakin penting sebagai akibat dari perubahan dan pengaruh tatanan ekonomi sosial dalam masyarakat. Pengeluaran tersebut di antaranya meliputi biaya untuk pendidikan, pembelian alat dan perlengkapan elektronik, pembelian alat transportasi, jasa komunikasi, jasa transportasi, jasa kesehatan, perjalanan wisata, restoran, sewa bangunan tempat tinggal, jasa hiburan dan sebagainya.

Tabel 8. Pertumbuhan Riil Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kota Palembang Tahun 2013 – 2017

(Persen)

Kelompok Konsumsi	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
a. Makanan Minuman dan Rokok	7,72	3,85	2,54	3,94	2,52
b. Pakaian dan Alas Kaki	7,07	10,14	5,94	4,76	2,54
c. Perumahan Perkakas Perleng- kapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	10,32	1,28	6,78	3,46	2,32
d. Kesehatan & Pendidikan	7,47	7,63	6,32	4,54	1,30
e. Transportasi Komunikasi Rekreasi dan Budaya	3,96	12,74	6,94	6,81	4,15
f. Hotel & Restoran	7,59	8,75	7,07	7,83	1,52
g. Lainnya	(4,84)	(0,35)	2,37	1,36	3,57

Dilihat dari pertumbuhan pengeluaran rumah tangga untuk setiap kelompok konsumsi menunjukkan fluktuasi. Pertumbuhan ini menunjukkan adanya perubahan konsumsi rumah tangga dalam bentuk kuantum (volume) dari waktu ke waktu. Informasi ini menunjukkan terjadinya peningkatan kemakmuran masyarakat, meskipun hanya dinikmati oleh kelompok masyarakat tertentu.

Sementara itu, tingkat perubahan harga yang secara implisit disajikan dalam Tabel 9 menunjukkan fluktuasi setiap tahunnya. Tingkat perubahan harga yang fluktuatif terjadi pada sub kelompok makanan, dengan peningkatan harga (inflasi) tertinggi sebesar 8,50 persen pada tahun 2014 dan mengalami penurunan harga hingga sebesar 1,77 persen pada tahun 2017. Pada sub kelompok pakaian dan alas kaki inflasi tertinggi sebesar 9,93 persen terjadi pada tahun 2013, dan mengalami penurunan hingga sebesar 2,28 persen pada tahun 2017.

Tabel 9. Pertumbuhan Implisit (Indeks Harga) Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kota Palembang Tahun 2013–2017<sup>4</sup>

					(
Kelompok Konsumsi	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
a. Makanan, Minuman, dan Rokok	6,29	8,50	1,54	4,88	1,77
b. Pakaian dan Alas Kaki	9,93	0,62	7,76	3,44	2,28
c. Perumahan, Perkakas, Perleng- kapan, dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	4,75	6,75	8,57	4,04	1,49
d. Kesehatan & Pendidikan	3,76	-1,47	7,32	5,64	4,89
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi dan Budaya	4,06	5,96	5,15	1,73	2,12
f. Hotel & Restoran	6,70	-2,68	4,33	4,79	5,26
g. Lainnya	8,58	-3,90	7,85	7,77	4,23

Pada sub kelompok perumahan, perkakas, perlengkapan dan penyelenggaraan rumahtangga, peningkatan harga cenderung stabil selama 2013-2016 di atas 4 persen, namun pada tahun 2014 terjadi penurunan harga pada tahun 2017 hingga mencapai 1,49 persen. Kondisi yang sama terjadi pada sub kelompok kesehatan dan pendidikan, bahkan pada tahun 2014, subkelompok ini mengalami deflasi. Kemudian pada kelompok berikutnya yaitu Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya, peningkatan harga tertinggi terjadi pada tahun 2014 (5,96 persen). Adanya kebijakan pemerintah mengenai penyelenggaraan kegiatan yang tidak boleh dilakukan di hotel menyebabkan terjadinya deflasi untuk sub kelompok hotel dan restoran sebesar 2,68 persen di tahun 2014. Kelompok konsumsi lainnya mengalami peningkatan harga tertinggi di tahun 2013 sebesar 8,58 persen.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Tingkat perubahan harga produk konsumsi

# 3.3 PERKEMBANGAN KONSUMSI AKHIR LNPRT

Konsumsi akhir LNPRT peranannya dalam PDRB menurut pengeluaran sangat kecil bila dibandingkan dengan komponen pengeluaran lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa peranan institusi ini dalam perekonomian suatu wilayah semestinya dapat lebih ditingkatkan lagi.

Tabel 10. Perkembangan Penggunaan Konsumsi LNPRT Kota Palembang Tahun 2013 – 2017

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi LNPRT a, ADHB ( <i>Miliar Rp</i> ) b, ADHK 2010 ( <i>Miliar Rp</i> )	1 118,31 931,10	1 362,12 1 085,65	1 465,91 1 161,83	1 547,95 1 213,87	1 600,76 1 224,77
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	1,31	1,43	1,35	1,30	1,23

Secara total, pengeluaran konsumsi akhir LNPRT menunjukkan peningkatan, baik untuk adh Berlaku maupun adh Konstan 2010. Pada tahun 2013 total pengeluaran konsumsi akhir LNPRT adh Berlaku sebesar 1,12 triliun rupiah, kemudian meningkat terus hingga pada tahun 2017 nilainya mencapai 1,60 triliun rupiah. Demikian halnya dengan konsumsi LNPRT adh Konstan 2010, yang juga mengalami peningkatan pada masing-masing tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa secara riil telah terjadi kenaikan pengeluaran LNPRT dari sisi kuantitas. Dari tahun 2013-2017 peran LNPRT terhadap total PDRB berkisar antara 1,23 – 1,43 persen.

## 3.4 PERKEMBANGAN KONSUMSI AKHIR PEMERINTAH

Konsumsi akhir pemerintah bersama dengan pengeluaran akhir rumah tangga dan LNPRT merupakan jumlah dari konsumsi akhir dalam suatu perekonomian suatu wilayah. Peranan konsumsi pemerintah dalam perekonomian Kota Palembang serta bagaimana perkembangannya akan dijelaskan dalam uraian dibawah ini.

Secara total, pengeluaran konsumsi akhir pemerintah menunjukkan peningkatan, baik untuk adh Berlaku maupun adh Konstan 2010. Pada tahun 2013 total pengeluaran konsumsi akhir pemerintah adh Berlaku sebesar 5,37 trilyun rupiah, kemudian meningkat terus hingga

pada tahun 2017 nilainya mencapai 7,28 trilyun rupiah. Demikian halnya dengan konsumsi pemerintah adh Konstan 2010, yang juga mengalami peningkatan pada masing-masing tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa secara riil telah terjadi kenaikan pengeluaran pemerintah dari sisi kuantitas.

Tabel 11. Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah Kota Palembang Tahun 2013 – 2017

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi Pemerintah a, ADHB ( <i>Miliar Rp</i> )	5 372,46	5 495,00	5 934,52	5 796,23	7 282,70
b, ADHK 2010 (Miliar Rp)	4 411,54	4 486,09	4 720,68	4 352,06	4 931,45
Proporsi terhadap PDRB (% - ADHB)	6,31	5,78	5,48	4,88	5,58
Konsumsi Pemerintah per- Kapita ( <i>Ribu Rp</i> )					
a. ADHB	3 497,84	3 525 84	3 749,77	3 609,05	4 470,35
b. ADHK 2010	2 872,22	2 878,48	2 982,79	2 709,83	3 027,08
Konsumsi Pemerintah per- Pegawai Pemerintah ( <i>Ribu Rp</i> )					
a. ADHB	364 234,34	375 034,07	396 162,98	399 712,77	580 757,52
b. ADHK 2010	299 087,48	306 176,32	315 132,06	300 121,23	393 257,33
Pertumbuhan <sup>5</sup>					_
a. Total Konsumsi Pemerintah	5,08	1,69	5,23	-7,81	13,31
b. Konsumsi per Kapita	3,54	0,22	3,62	-9,15	11,71
c. Konsumsi per Pegawai	8,27	2,37	2,93	-9,78	31,03
Jumlah Pegawai Pemerintah <sup>6</sup>	14 750	14 652	14 980	14 501	12 540
Jumlah Penduduk (000 org)	1 536	1 558	1 583	1 606	1 629

Menarik untuk dicermati lebih lanjut bahwa proporsi pengeluaran akhir pemerintah terhadap PDRB juga mengalami kestabilan yaitu sekitar 4-6 persen. Sepanjang periode tersebut proporsi terendah terjadi pada tahun 2016 yaitu 4,88 persen sedangkan proporsi tertinggi pada tahun 2013 yang mencapai 6,31 persen. Peningkatan tersebut didominasi oleh pengeluaran pemerintah untuk konsumsi kolektif yang didalamnya meliputi pengeluaran pendidikan yang terbesar, pelayanan umum, perumahan dan fasilitas umum lainnya dan lain-lain.

Dalam prakteknya, pengeluaran pemerintah seringkali dikaitkan dengan luasnya cakupan layanan yang diberikan pada masyarakat (publik). Kondisi tersebut dapat diartikan

PDRB Menurut Pengeluaran Kota Palembang, Tahun 2013-2017

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Diturunkan dari perhitungan PDRB (atas dasar harga konstan /ADHK 2010)

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Tidak termasuk polisi dan militer

bahwa setiap rupiah pengeluaran pemerintah harus ditujukan untuk melayani penduduk baik langsung maupun tidak langsung. Pengeluaran konsumsi pemerintah secara total menunjukkan peningkatan, hal ini diikuti oleh adanya peningkatan pada rata-rata konsumsi pemerintah per-kapita. Pada tahun 2013 konsumsi pemerintah per-kapita adh Berlaku sebesar 3.497,84 ribu rupiah dan terus meningkat pada tahun-tahun berikutnya hingga 4.470,35 ribu rupiah tahun 2017 (lihat Tabel 11).

Rata-rata konsumsi pemerintah per-kapita adh Konstan (2010) menunjukkan adanya pertumbuhan yang fluktuatif selama tahun 2013 sampai tahun 2017 (lihat Tabel 11). Pada tahun 2016 bahkan terjadi kontraksi, dimana konsumsi pemerintah per kapita tumbuh negatif 9,15 persen. Namun pada tahun 2017, konsumsi pemerintah per kapita mengalami pertumbuhan sebesar 11,71 persen. Perlambatan yang terjadi pada tahun 2016 tersebut menunjukkan adanya penurunan pengeluaran konsumsi pemerintah secara kuantitas.

Rata-rata konsumsi per pegawai pemerintah menunjukkan kecenderungan yang berfluktuatif. Pada tahun 2013 konsumsi pemerintah per-pegawai pemerintah sebesar 364.234,34 ribu rupiah, kemudian meningkat menjadi 580.757,52 ribu rupiah pada tahun 2017 (lihat Tabel 11). Pada tingkat harga konstan 2010 indikator pemerataan menurut pegawai ini juga menunjukkan kecenderungan yang berfluktuatif. Persentase penurunan yang sangat signifikan terjadi pada tahun 2016, yaitu sebesar 300.121,23 ribu rupiah atau negatif 4,76 persen.

Gambaran tentang konsumsi akhir pemerintah secara "riil" menunjukkan peningkatan baik secara keseluruhan maupun rata-rata (per penduduk maupun per pegawai pemerintah). Parameter ini adalah pendekatan untuk mengukur pemerataan kesempatan masyarakat atas penggunaan sumber daya finansial oleh pemerintah. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2017 untuk total konsumsi pemerintah yaitu sebesar 13,31 persen; untuk konsumsi per-kapita 11,71 persen tahun 2017; dan untuk konsumsi per-pegawai 13,03 persen pada tahun 2017.

Hal lain yang patut dicermati adalah perbandingan antara jumlah pegawai pemerintah dengan jumlah penduduk. Data di atas menunjukkan bahwa jumlah pegawai pemerintah berfluktuasi secara gradual dari 14.750 orang (2013) menjadi 14.652 orang (2014), 14.980 orang (2015), 14.501 orang (2016) dan 12.540 orang (2017).

# 3.5 PERKEMBANGAN PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO

Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dalam PDRB menurut pengeluaran menjelaskan tentang bagian dari pendapatan (*income*) yang direalisasikan menjadi investasi fisik. Pada sisi berbeda dapat pula diartikan sebagai gambaran dari berbagai produk barang dan jasa yang sebagian digunakan sebagai investasi fisik (kapital)<sup>7</sup>. Kapital berfungsi sebagai input tidak langsung (*indirect input*) di dalam proses produksi pada berbagai lapangan usaha. Kapital ini dapat berasal dari produksi domestik maupun dari impor.

Selain peningkatan yang terjadi pada komponen konsumsi akhir (rumah tangga maupun pemerintah), PMTB juga menunjukkan peningkatan baik secara nominal maupun riil. Data di atas menjelaskan bahwa secara keseluruhan pertumbuhan PMTB dalam kurun waktu 2013 - 2017 berfluktuasi dari 6,15 persen (2013) menjadi 9,02 persen (2017). Pertumbuhan PMTB pada masing-masing komponen sangat bervariasi antar tahunnya. Sub komponen bangunan merupakan komponen dengan proporsi terbesar dalam pembentukan modal tetap. Pertumbuhan di sektor bangunan meskipun cenderung meningkat tetapi polanya relatif stabil dibandingkan dengan pertumbuhan sub komponen PMTB non bangunan.

Proporsi non bangunan terhadap total PMTB berfluktuasi selama periode 2013 – 2017 (Tabel 12). Kisaran pertumbuhan 2013 s.d 2017 antara 6 hingga 9 persen, kecuali tahun 2015 terjadi kontraksi sebesar 1,60 persen. Perubahan yang terjadi pada proporsi tersebut tidak lepas dari pengaruh pertumbuhan yang terjadi pada masing-masing sub komponen PMTB tersebut. Pertumbuhan "riil" sub komponen bangunan pada tahun 2013 sebesar 7,06 persen dan terus mengalami percepatan hingga tahun 2017 sebesar 9,75 persen, dengan kontraksi sebesar 3,20 persen pada tahun 2015.

Sementara itu, sub komponen non bangunan menunjukkan pola yang sama dengan sub komponen bangunan, tetapi pada level yang lebih rendah. Dalam periode tahun 2013 sampai dengan 2014 pertumbuhan non bangunan mengalami fluktuasi pertumbuhan dari 0,86 persen (2013) menjadi 3,63 persen (2014) dan mengalami kontraksi di level 8,67 persen pada tahun 2015 dan di tahun 2017 tumbuh menjadi 3,53 persen.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Selain bagian lain yang menjadi konsumsi antara, konsumsi akhir, ataupun diekspor

Tabel 12. Perkembangan dan Struktur PMTB Kota Palembang Tahun 2013 – 2017

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total PMTB					
a. ADHB (Miliar Rp)	47 596,27	51 775,12	51 201,54	56 418,73	61 601,04
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	34 687,63	37 320,60	37 918,39	41 067,17	44 772,87
Proporsi terhadap PDRB				0.	
(% - ADHB)	55,87	54,46	47,30	47,52	47,23
Struktur PMTB 8			Con		
a. Bangunan (Miliar Rp)	42 392, 11	47 148,89	46 806,81	52 159,70	57 187,74
(%)	(86,04)	(86,56)	(87,92)	(88,28)	(88,87)
b. Non Bangunan (Mil Rp)	5 204,16	4 626,23	4 394,73	4 259,03	4 413,30
(%)	(13,96)	(13,44)	(12,08)	(11,72)	(11,13)
	(10,50)	(13,11)	(12,00)	(11), 2)	(11/10)
Total PMTB (Miliar Rp)	47 596,27	51 775,12	51 201,54	56 418,73	61 601,04
(%)	(100,00)	(100,00)	(100,00)	(100,00)	(100,00)
Pertumbuhan <sup>9</sup> (%)	9				
a. Bangunan	7,06	8,23	3,20	8,76	9,75
b. Non Bangunan	0,86	3,63	-8,67	5,01	3,53
Total PMTB	6,15	7,59	1,60	8,30	9,02

# 3.6 PERKEMBANGAN PERUBAHAN INVENTORI

Secara konsep, yang dimaksud dengan perubahan inventori adalah perubahan dalam bentuk "persediaan" berbagai barang yang belum digunakan lebih lanjut dalam proses produksi konsumsi ataupun investasi (kapital). Perubahan yang dimaksud disini bisa berarti penambahan (positif) dan atau pengurangan (negatif).

Dari sisi penghitungan, komponen Perubahan Inventori merupakan salah satu komponen yang hasilnya bisa memiliki 2 (dua) tanda, positif atau negatif (disamping komponen net ekspor antar daerah). Apabila perubahan inventori positif berarti terjadi penambahan persediaan barang, sedangkan apabila negatif berarti terjadi pengurangan persediaan. Terjadinya penumpukan barang inventori mengindikasikan bahwa distribusi atau pemasaran tidak berjalan dengan sempurna. Secara umum, komponen perubahan inventori

<sup>8</sup> Diturunkan dari perhitungan PDRB (atas dasar harga berlaku /ADHB)

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Diturunkan dari perhitungan PDRB (atas dasar harga konstan/ADHK 2010)

dihitung berdasarkan pengukuran terhadap nilai persediaan barang pada awal dan akhir tahun (konsep stok).

Tabel 13. Perkembangan dan Struktur Perubahan Inventori Kota Palembang, Tahun 2013 – 2017

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Nilai Inventori				,O,	
a. ADHB (Miliar Rp)	-1 127,88	1 936,62	-1 382,44	-2 327,70	-3 313,99
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	-2 291,11	221,11	-601,59	-1 514,07	-1 923,72
Proporsi terhadap PDRB			7,0,		
(% - ADHB)	-1,32	2,04	-1,28	-1,96	-2,54

Berbeda dengan komponen pengeluaran lain yang dapat dianalisis secara rinci, perubahan inventori baru dapat dianalisis dari sisi proporsinya saja. Perbedaan dalam pendekatan dan tata cara estimasi menyebabkan komponen inventori tidak banyak dikaji lebih. Hal utama yang dapat dilihat dari komponen ini adalah bahwa proporsi dalam PDRB pada umumnya mempunyai besaran atau nilai yang berfluktuasi baik dalam level maupun tandanya (positif atau negatif),

# 3.7 PERKEMBANGAN EKSPOR

Dalam struktur permintaan akhir, transaksi ekspor menggambarkan berbagai produk barang dan jasa yang tidak dikonsumsi di wilayah ekonomi domestik, tetapi dikonsumsi oleh pihak luar daerah, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Secara total, nilai ekspor Kota Palembang ke luar daerah menunjukkan peningkatan dari tahun 2013 hingga tahun 2017, dimana pada tahun 2013, nilai ekspor mencapai 21,36 trilyun rupiah dan terus mengalami peningkatan hingga pada tahun 2017 sebesar 27,13 trilyun rupiah. Pada tahun 2017, ekspor mengalami kenaikan yang cukup tajam, sebesar 4,57 trilyun rupiah. Sejalan dengan nilai ekspor adh Berlaku, nilai ekspor adh Konstan 2010 juga menunjukkan arah pertumbuhan yang sama kecuali pada tahun 2015. Pada tahun 2015, meskipun secara ADHB nilai ekspor mengalami peningkatan, tetapi secara ADHK nilai ekspor mengalami penurunan, yaitu negatif 5,60 persen. Hal ini terjadi karena selain harga beberapa komoditas ekspor menurun juga terjadi pelemahan nilai tukar rupiah.

Tabel 14, Perkembangan Ekspor Kota Palembang Tahun 2013 - 2017

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Nilai Ekspor a. ADHB ( <i>Miliar Rp</i> ) b. ADHK 2010 ( <i>Miliar Rp</i> )	21 355,61 20 330,82	20 168,20 23 309,51	22 546,86 22 005,21	22 569,11 20 525,42	27 135,45 24 634,89
Proporsi terhadap PDRB (% - ADHB)	25,07	21,21	20,83	19,01	20,81
Pertumbuhan <sup>10</sup> Total ekspor	17.37	14,65	-5,60	-6,72	20,02

## 3.8 PERKEMBANGAN IMPOR

Aktivitas pengeluaran (konsumsi rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah) maupun PMTB (termasuk inventori), didalamnya terkandung produk yang berasal dari impor. PDRB menggambarkan produk yang benar-benar dihasilkan oleh ekonomi Kota Palembang, sehingga untuk mengukur potensi dan besaran produk domestik, maka komponen impor tersebut harus dikeluarkan dari penghitungan yaitu dengan cara mengurangkan nilai PDRB (E) dengan nilai impornya. Hasil pengurangan inilah yang secara konsep harus sama dengan nilai PDRB menurut lapangan usaha.

Berbeda dengan komponen ekspor, transaksi impor menjelaskan ada tambahan penyediaan (*supply*) produk di wilayah ekonomi domestik yang berasal dari dari non residen. Impor terdiri dari produk barang maupun jasa, meskipun rincian penggolongan-nya bisa berbeda dengan ekspor.

Perkembangan yang terjadi pada transaksi impor menunjukkan semakin kuatnya ketergantungan Palembang terhadap ekonomi atau produk daerah lain sampai tahun 2014. Pada tahun 2015 ketergantungan dari produk impor menurun hingga 7,43 persen dan tahun 2016 menurun hingga 4,39 persen. Komponen impor termasuk pembelian berbagai produk barang dan jasa secara langsung (*direct purchase*) oleh penduduk (*resident*) Kota Palembang di luar daerah baik yang berupa makanan maupun bukan makanan (termasuk jasa).

\_

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Diturunkan dari perhitungan PDRB (ADHK 2000)

Tabel 15. Perkembangan Impor Kota Palembang Tahun 2013 – 2017

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Nilai Impor					
a. ADHB (Miliar Rp)	47 325,63	50 639,01	42 190,83	42 462,65	45 046,88
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	33 773,58	41 181,90	38 122,04	36 447,70	40 625,50
Proporsi terhadap PDRB (% - ADHB)	55,55	53,26	38,98	35,77	34,54
Pertumbuhan <sup>11</sup> Total impor	-2,50	21,94	-7,43	-4,39	11,46

Tabel 15 di atas menunjukkan bahwa pola perkembangan impor Kota Palembang pada periode tahun 2013 sampai dengan 2017 cenderung berfluktuasi (baik adh Berlaku maupun adh Konstan 2010). Pada tahun 2014 nilai impor mengalami kenaikan yang sangat signifikan mencapai 50,64 trilyun rupiah.

Secara riil, hal ini ditunjukkan dengan peningkatan signifikan nilai impor pada tahun 2014 sebesar 21,94 persen. Hal ini disebabkan adanya kegiatan pembangunan infrastruktur dan pabrik-pabrik di Kota Palembang yang membutuhkan mesin-mesin pada tahun 2014, sehingga banyak sekali barang yang diimpor dari luar negeri. Dua tahun berikutnya pertumbuhan impor melambat hingga negatif 7,43 dan negatif 4,39 persen. Namun pada tahun 2011 pertumbuhan impor mengalami peningkatan yang signifikan yaitu hingga 11,46 persen. Peningkatan signifikan itu terjadi karena semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat di Kota Palembang terutama persiapan di dalam menghadapi perhelatan besar Asean Games 2018.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Diturunkan dari perhitungan PDRB (ADHK 2000)

# agkota.hos.go.id

# BAB IV

PERKEMBANGAN AGREGAT PDRB MENURUT PENGELUARAN KOTA PALEMBANG 2013-2017 Berbagai indikator ekonomi makro yang lazim digunakan dalam analisis sosial ekonomi diturunkan dari seperangkat data PRDB. Berikut ini akan disajikan beberapa rasio (perbandingan relatif) guna melengkapi analisis, di tengah keterbatasan informasi yang tersedia.

# 4.1 PDRB (Nominal)

PDRB dapat digunakan sebagai ukuran "produktivitas", karena menjelaskan kemampuan wilayah dalam menghasilkan produk domestik, yang dihitung melalui 3 (tiga) pendekatan, yaitu pendekatan nilai tambah, pengeluaran, dan pendapatan. Agregat ini menjelaskan nilai produk barang dan jasa yang dihasilkan di dalam suatu wilayah ekonomi domestik, di mana di dalamnya masih terkandung nilai penyusutan.

Dari series data PDRB pengeluaran dapat diturunkan beberapa ukuran yang berkaitan dengan PDRB maupun variabel pendukung lain (seperti rumah tangga, dan tenaga kerja). Sebagai contoh, untuk melihat perkembangan tingkat pemerataan, misalnya, maka disajikan data PDRB perkapita.

Tabel 16. Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Perkapita Kota Palembang Tahun 2013 – 2017

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nilai PDRB (Miliar Rp)					
- ADHB	85 193,32	95 072,89	108 243,95	118 715,62	130 415,69
- ADHK 2010	74 193,37	78 091,09	82 345,07	87 088,35	92 454,78
PDRB perkapita (Ribu Rp)					
- ADHB	55 466,71	61 003,05	68 394,68	73 918,77	80 053,34
- ADHK 2010	48 304,99	50 106,76	52 030,29	54 225,93	56 751,71
Pertumbuhan PDRB perkapita ADHK 2010	4,30	3,73	3,84	4,22	4,66
Jumlah penduduk					
(000 jiwa)	1 536	1 558	1 583	1 606	1 629
Pertumbuhan	1,49	1,47	1,55	1,48	1,44

PDRB per-kapita Kota Palembang menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, seiring dengan kenaikan jumlah penduduk (Tabel 16). Indikator ini menunjukkan bahwa

secara ekonomi setiap penduduk Kota Palembang rata-rata mampu menciptakan PDRB atau (nilai tambah) sebesar nilai perkapita di masing-masing tahun tersebut.

Sementara itu pertumbuhan per-kapita secara "riil" menurun pada kisaran 3-4 persen pada periode 2013 hingga 2017, dengan pertumbuhan perkapita tertinggi di tahun 2017 sebesar 4,66 persen. Pertumbuhan ekonomi tersebut diikuti pula oleh penambahan jumlah penduduk, yang meningkat rata-rata 1,49 persen setiap tahunnya. Dengan demikian maka pertumbuhan per-kapita tersebut tidak saja terjadi secara "riil" tetapi juga terjadi secara kualitas.

# 4.2 PERBANDINGAN PENGGUNAAN PDRB UNTUK KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA TERHADAP EKSPOR

Indikator ini menunjukkan perbandingan antara produk yang dikonsumsi rumah tangga di wilayah domestik dengan produk yang di ekspor. Selama ini konsumsi rumah tangga mempunyai peranan yang sangat dominan dalam penggunaan PDRB Kota Palembang (sekitar 60 persen), yang artinya bahwa seluruh produk yang dihasilkan di wilayah Palembang sebagian besar digunakan untuk konsumsi akhir rumah tangga. Namun di dalamnya termasuk pula sebagian produk yang berasal dari impor.

Tabel 17. Perbandingan PDRB Pengeluaran untuk Konsumsi Akhir Rumah Tangga terhadap Ekspor Tahun 2013 – 2017

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Konsumsi RT (ADHB) (Miliar Rp)	58 204,18	64 974,93	70 668,39	77 173,94	81 156,62
Ekspor (ADHB) (Miliar Rp)	21 355,61	20 168,20	22 546,86	22 569,11	27 135,45
Perbandingan Konsumsi RT terhadap Ekspor LN	2,73	3,22	3,13	3,42	2,99

Data di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2013, produk yang digunakan untuk konsumsi rumah tangga lebih dari 2 kali produk yang di eskpor. Hal ini berarti bahwa sebagian besar penyediaan (supply) domestik diserap untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir rumah tangga. Penurunan rasio yang relatif tajam pada tahun 2017 (2,99) lebih disebabkan karena peningkatan nilai ekspor dan konsumsi rumah tangga juga meningkat. Secara implisit data tersebut menjelaskan, bahwa nilai konsumsi akhir rumah tangga semakin

meningkat dan nilai ekspor pun semakin meningkat. Peningkatan dan penurunan tersebut disebabkan oleh perubahan volume maupun harga. Selain itu, penurunan yang relatif tajam dari tahun 2016 ke tahun 2017 disebabkan oleh adanya peningkatan pertumbuhan ekspor untuk memenuhi konsumsi akhir rumah tangga.

# 4.3 PERBANDINGAN KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA TERHADAP PMTB

Rasio Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) ini merupakan perbandingan antara produk yang digunakan untuk konsumsi akhir rumah tangga dengan yang digunakan untuk investasi fisik (pembentukan modal tetap).

Tabel 18. Perbandingan Konsumsi Rumah Tangga terhadap PMTB Tahun 2013 – 2017

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi RT (ADHB) (Miliar Rp)	58 204,18	64 974,93	70 668,39	77 173,94	81 156,62
Total PMTB (ADHB) (Miliar Rp)	47 596,27	51 775,12	51 201,54	56 418,73	61 601,04
Perbandingan Konsumsi RT thd PMTB	1,22	1,25	1,38	1,37	1,32

Seperti halnya terhadap ekspor luar negeri, rasio konsumsi rumah tangga terhadap PMTB cenderung bertambah, dari sebesar 1,63 pada tahun 2013 menjadi 1,73 pada tahun 2017. Hal ini terjadi karena kenaikan nilai investasi lebih lambat dibandingkan dengan konsumsi akhir rumah tangga yang mengalami percepatan.

# 4.4 PERBANDINGAN KONSUMSI AKHIR TERHADAP PDRB

Yang dimaksud dengan konsumsi akhir adalah penggunaan berbagai produk barang dan jasa akhir (baik berasal dari produk domestik maupun impor), untuk menunjang aktivitas ekonomi. Pelaku konsumsi akhir meliputi rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah. Walaupun ketiga institusi tersebut mempunyai fungsi yang berbeda dalam sistem ekonomi, tetapi samasama membelanjakan sebagian pendapatannya untuk tujuan konsumsi akhir.

Tabel 19. Proporsi Total Penggunaan Konsumsi Akhir terhadap PDRB Kota Palembang Tahun 2013 – 2017

Uraian	2013	2014 2015		2016	2017	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
Konsumsi Akhir (ADHB)						
(Miliar Rp)				4.0		
a. Rumah tangga	58 204,18	64 974,93	70 668,39	77 173,94	81 156,62	
b. LNPRT	1 118,31	1 362,12	1 465,91	1 547,95	1 600,76	
c. Pemerintah	5 372,46	5 495,00	5 934,52	5 796,23	7 282,70	
Jumlah	64 694,94	71 832,05	78 068,83	84 518,13	90 040,08	
PDRB (ADHB) (Miliar Rp)	85 193,32	95 072,89	108 243,95	118 715,62	130 415,69	
Proporsi	75,94	75,55	72,12	71,19	69,04	

Sebagian besar barang dan jasa yang berada di wilayah domestik digunakan untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir (lebih dari 60 persen). Konsumsi akhir makin meningkat setiap tahunnya, diikuti juga proporsinya terhadap PDRB. Dalam hal ini, produk yang tidak digunakan menjadi konsumsi akhir (PMTB atau eskpor) memiliki peran yang relatif kecil.

# 4.5 PERBANDINGAN EKSPOR TERHADAP PMTB

Ekspor merupakan produk yang tidak dikonsumsi di wilayah domestik, tetapi diperdagangkan ke luar negeri/provinsi/daerah. Untuk menghasilkan produk yang diekspor kemungkinan besar menggunakan kapital (PMTB). Sementara di sisi lain sebagian barang yang diekspor bisa pula berupa barang kapital. Rasio ekspor terhadap PMTB dimaksudkan untuk menunjukkan perbandingan antara nilai produk ekspor dengan nilai produk yang menjadi kapital (PMTB).

Pada periode 2013 - 2017 ekspor Kota Palembang mempunyai nilai yang lebih rendah dari PMTB (Tabel 20). Untuk menghasilkan seluruh produk domestik (termasuk ekspor) disyaratkan tersedianya sejumlah kapital (yang di dalamnya termasuk pula kapital impor). Rasio ekspor terhadap PMTB berfluktuasi dan nilainya berada di 0,44-0,45 pada tahun 2013, 2015 dan 2017. Sementara di tahun 2014 dan 2016 nilai rasionya mengalami penurunan menjadi

0,39 dan 0,44. Penurunan rasio tersebut di antaranya disebabkan oleh kenaikan PMTB yang relatif lebih pesat dibandingkan dengan kenaikan ekspor.

Tabel 20. Rasio Ekspor terhadap PMTB (ADHB) Tahun 2013-2017

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Ekspor (ADHB) (Miliar Rp)	21 355,61	20 168,20	22 546,86	22 569,11	27 135,45
Total PMTB (ADHB) (Miliar Rp)	47 596,27	51 775,12	51 201,54	56 418,73	61 601,04
Rasio Ekspor terhadap PMTB	0,45	0,39	0,44	0,40	0,44

# 4.6 PERBANDINGAN PDRB TERHADAP IMPOR

Rasio ini memberikan gambaran tentang perbandingan antara produk yang dihasilkan di wilayah ekonomi domestik (PDRB) dengan produk yang berasal dari impor. Selain itu data tersebut menjelaskan tentang ketergantungan PDRB terhadap produk yang dihasilkan oleh negara/provinsi lain. Jika rasionya kecil berarti ketergantungan akan impor semakin tinggi, dan sebaliknya.

Tabel 21. Rasio PDRB terhadap Impor Kota Palembang Tahun 2013 – 2017

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PDRB (ADHB) (Miliar Rp)	85 193,32	95 072,89	108 243,95	118 715,62	130 415,69
Total Impor (ADHB) (Miliar Rp)	47 325,63	50 639,10	42 190,84	42 462,65	45 046,88
Rasio PDRB terhadap Impor	1,80	1,88	2,57	2,80	2,90

Rasio PDRB terhadap impor tahun 2013 - 2017 berkisar antara 1,80 (2013) sampai 2,90 (2017). Rasio ini menunjukkan bahwa hampir setengah dari PDRB Kota Palembang tergantung terhadap produk luar baik daerah Palembang, yang berasal dari dalam dan luar negeri.

# 4.7 KESEIMBANGAN TOTAL PENYEDIAAN DAN TOTAL PERMINTAAN

Rasio ini dapat menunjukkan seberapa jauh ketergantungan ekonomi suatu daerah oleh produk yang berasal dari impor. Ketergantungan (ketidakseimbangan) tersebut dapat dilihat melalui keseimbangan antara total penyediaan (*supply*) dengan total permintaan akhir (*demand*).

Dari Tabel 22, dapat dilihat bahwa untuk memenuhi permintaan akhir Kota Palembang, sebagian produk masih harus didatangkan dari luar Palembang, dengan rentang 25-35 persen. Dengan kata lain, kebutuhan masyarakat baru bisa dipenuhi sekitar 65-75 persen dari hasil produksi di Kota Palembang. Dalam kurun waktu tersebut, tendensi permintaan (akhir) masyarakat terus meningkat setiap tahunnya, dari 132,52 trilyun rupiah (2013) menjadi sebesar 175,46 trilyun rupiah (2017).

Tabel 22. Sisi Keseimbangan Penyediaan dan Permintaan Kota Palembang Tahun 2013 – 2017

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Penyediaan PDRB (ADHB) (Miliar Rp )	85 193,32	95 072,89	108 243,95	118 715,62	130 415,69
%	(64,29)	(65,25)	(71,95)	(73,65)	(74,33)
Total nilai Impor ADHB (Miliar Rp) %	47 325,63 (35,71)	50 639,10 (34,75)	42 190,84 (28,05)	42 462,65 (26,35)	45 046,88 (25,67)
Total Permintaan Akhir¹ (Miliar Rp) %	132 518,94 (100,00)	145 711,99 (100,00)	150 434,78 (100,00)	161 178,27 (100,00)	175 462,58 (100,00)

Di sisi lain "penyediaan" produk yang mampu dihasilkan oleh ekonomi di Kota Palembang masing-masing sebesar 85,19 trilyun rupiah (2013) dan meningkat menjadi 130,42 trilyun rupiah pada tahun 2017. Karena produk di dalam Kota Palembang tidak mampu mencukupi seluruh kebutuhan permintaan, maka berbagai produk barang dan jasa diimpor, baik dari luar daerah, provinsi maupun dari luar negeri dengan nilai masing-masing tahun sebesar 47,32 trilyun rupiah (2013) menjadi 45,05 trilyun rupiah pada tahun 2017.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Termasuk diskrepansi statistik

# 4.8 NERACA PERDAGANGAN (TRADE BALANCE)

Transaksi devisa yang berasal dari perdagangan barang dan jasa dengan pihak luar negeri (non-residen) dan luar provinsi dapat dilihat melalui neraca perdagangan. Secara konsep, selisih antara nilai ekspor dan nilai impor disebut sebagai "Ekspor Neto", apabila nilai ekspor lebih besar dari nilai impor, maka terjadi surplus, dan sebaliknya yang terjadi adalah defisit. Dilihat dari arus uang yang masuk atau keluar, apabila tingkat keseimbangan dalam posisi surplus, maka terjadi aliran devisa masuk, sebaliknya kalau posisinya defisit maka terjadi aliran devisa keluar. Dalam hal ini dapat dijelaskan bahwa kekuatan ekonomi suatu wilayah di antaranya ditentukan oleh proses tersebut.

Selain gambaran posisi neraca perdagangan, dapat juga dilihat perbandingan antara nilai ekspor terhadap impor, meskipun hanya berlaku secara total. Namun rasio tersebut tidak dapat merefleksikan perbandingan menurut jenis komoditas, harga maupun kuantum. Apabila rasio lebih besar dari 1 (satu) maka nilai ekspor lebih tinggi daripada nilai impor, sebaliknya

Tabel 23. Neraca Perdagangan Kota Palembang Tahun 2013 – 2017

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nilai Ekspor (ADHB) (Miliar Rp)	21 355,61	20 168,20	22 546,86	22 569,11	27 135,45
Nilai Impor (ADHB) (Miliar Rp)	47 325,63	50 639,10	42 190,84	42 462,65	45 046,88
Net ekspor (X - M) (Miliar Rp)	-25 970,01	-30 470,90	-19 643,98	-19 893,54	-17 911,44
Rasio ekspor terhadap Impor	0,45	0,40	0,53	0,53	0,60

apabila rasio kurang dari 1 berarti nilai impor lebih tinggi dari nilai ekspor. Besar kecilnya ekspor atau impor suatu daerah sangat tergantung kondisi ekonomi serta kebutuhan masyarakatnya.

Selama periode 2013 - 2017, posisi perdagangan barang dan jasa Kota Palembang dengan luar daerah, selalu menunjukkan nilai negatif. Hal ini menunjukkan neraca perdagangan barang dan jasa Kota Palembang selalu dalam posisi defisit. Nilai ekspor yang lebih rendah dari impor menyebabkan adanya aliran devisa yang keluar. Defisit perdagangan Palembang terjadi sepanjang tahun 2013 sampai dengan 2017, dan tercatat berkisar antara 17.911,44 milyar

rupiah pada tahun 2017 hingga 30.470,90 milyar rupiah pada tahun 2014. Sementara rasio ekspor terhadap impor cenderung meningkat terutama dari tahun 2014 hingga 2017.

# 4.9 INCREMENTAL CAPITAL OUTPUT RATIO (ICOR)

"ICOR" merupakan parameter ekonomi makro yang menggambarkan rasio kapital/modal terhadap hasil yang diperoleh (*output*) ICOR juga bisa diartikan sebagai dampak penambahan kapital terhadap penambahan sejumlah output (keluaran).

Kapital diartikan sebagai barang modal fisik yang dibuat oleh manusia dari sumber daya alam untuk digunakan secara terus menerus dan berulang dalam proses produksi. Sedangkan output adalah besarnya nilai keluaran dari suatu proses ekonomi (produksi) yang dalam hal ini digambarkan melalui parameter "Nilai Tambah". Dengan menggunakan rasio ini maka ICOR mampu menjelaskan perbandingan antara penambahan kapital terhadap output atau yang diartikan juga bahwa setiap pertambahan satu unit nilai output (keluaran) akan membutuhkan penambahan kapital sebanyak "K" unit. Formula:

$$ICOR = \frac{\Delta K}{\Delta Y} = \frac{I}{\Delta Y} = \frac{I_t}{Y_t - Y_{t-1}}$$
 dengan :  $I_t = \text{PMTB tahun ke t}$   $Y_t = \text{Output tahun ke t}$   $Y_{t-1} = \text{Output tahun ke t-1}$ 

Data di bawah menunjukkan besaran ICOR Kota Palembang relatif stabil selama tahun 2013 s.d tahun 2017 yaitu berkisar 8. ICOR Kota Palembang dari tahun 2013 hingga tahun 2017 dapat dilihat pada Tabel 24 di bawah ini.

Tabel 24. Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Kota Palembang Tahun 2013 – 2017

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PDRB (ADHK 2010) (Miliar Rp)	74 193.37	78 091,09	82 345,07	87 088,35	92 454,78
Perubahan (Miliar Rp)	4 103,06	3 897,72	4 253,97	4 743,29	5 366,43
PMTB (ADHK 2010) (Miliar Rp)	34 687,63	37 320,60	37 918,39	41 067,17	44 772,87
ICOR	8,45	9,57	8,91	8,66	8,34



- 1. PDRB menurut penggunaan tahun 2013 hingga 2017 dapat menggambarkan perubahan struktur dan perkembangan kondisi ekonomi Kota Palembang pada periode bersangkutan. Analisis ekonomi dari sisi penggunaan akan berbeda dengan analisis dari sisi lapangan usaha (industri) yang lebih fokus pada perilaku produksi. Analisis PDRB pengeluaran terfokus pada perilaku penggunaan barang dan jasa akhir baik untuk tujuan konsumsi akhir investasi (fisik), maupun perdagangan internasional dan antar daerah. Tiga kelompok sektor atau pelaku ekonomi yang menggunakan barang dan jasa akhir dalam suatu perekonomian adalah rumah tangga, lembaga non-profit yang melayani rumah tangga/LNPRT dan pemerintah,
- 2. Publikasi ini menyajikan analisis sederhana tentang perilaku konsumsi investasi dan perdagangan luar negeri dan perdagangan antar daerah yang dimaksud. Analisis didasarkan pada indikator yang diturunkan dari PDRB pengeluaran. Analisis tersebut juga dilengkapi dengan indikator sosial demografi (seperti penduduk, rumah tangga, dan pegawai negeri), sehingga hasil analisis yang disajikan menjadi lebih informatif.
- 3. Data dapat disajikan dalam bentuk series data dari tahun 2013 hingga 2017 sehingga mudah dalam menggambarkan perubahan atau kecenderungan yang terjadi antara waktu. Masing-masing parameter disajikan dalam satuan yang berbeda (rupiah, indeks, persentase, rasio unit, dan sebagainya) sesuai dengan tujuan analisis dan karakteristik masing-masing data.
- 4. Data dan indikator yang diturunkan dari sajian data PDRB menurut penggunaan dapat dijadikan acuan bagi pengembangan dan perluasan indikator ekonomi makro lain seperti pendapatan *disposable*, tabungan, serta model ekonomi sederhana yang saling berkaitan antara seluruh variabel ekonomi dan variabel yang tersedia. Bahkan secara langsung maupun tidak langsung dapat dikaitkan dengan tampilan data ekonomi makro lain seperti PDRB menurut lapangan usaha (industri), Tabel Input-Output, Sistem Neraca Sosial Ekonomi (SNSE) dan bahkan Neraca Arus Dana.
- 5. Sebagian data tentang interaksi dengan luar negeri (external account) secara agregat telah disajikan di sini seperti ekspor dan impor dan transfer berjalan (current tranfer) neto. Transaksi eksternal ini menggambarkan seberapa jauh ketergantungan ekonomi Kota Palembang terhadap ekonomi negara lain (rest of the world).



Tabel 1. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kota Palembang

(Juta Rupiah)

Komponen Pengeluaran	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	58,204,179	64,974,928	70,668,393	77,173,943	81,156,625
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	28,409,605	32,011,040	33,329,854	36,335,489	37,913,603
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	2,821,442	3,126,771	3,569,522	3,867,926	4,056,582
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	5,859,959	6,335,471	7,344,920	7,905,732	8,210,063
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	4,308,998	4,569,467	5,213,936	5,757,998	6,117,820
<ol><li>1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya</li></ol>	9,928,491	11,860,139	13,336,001	14,490,124	15,411,431
1.f. Hotel dan Restoran	4,842,186	5,124,797	5,724,248	6,468,236	6,911,923
1.g. Lainnya	2,033,498	1,947,243	2,149,912	2,348,438	2,535,202
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	1,118,306	1,362,123	1,465,914	1,547,951	1,600,757
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	5,372,457	5,494,999	5,934,521	5,796,235	7,282,699
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	47,596,270	51,775,117	51,201,538	56,418,731	61,601,044
4.a. Bangunan	42,392,106	47,148,890	46,806,808	52,159,698	57,187,745
4.b. Non-Bangunan	5,204,164	4,626,227	4,394,730	4,259,033	4,413,299
5. Perubahan Inventori	-1,127,879	1,936,624	-1,382,445	-2,327,699	-3,313,994
6. Ekspor	21,355,613	20,168,196	22,546,860	22,569,112	27,135,448
7. Impor	47,325,627	50,639,099	42,190,836	42,462,651	45,046,884
PDRB (1+2+3+4+5+6-7)	85,193,317	95,072,888	108,243,946	118,715,621	130,415,695

<sup>\*</sup> Angka Sementara

<sup>\*\*</sup> Angka Sangat Sementara

Tabel 2. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010

Menurut Pengeluaran, Kota Palembang

(Juta Rupiah)

Komponen Pengeluaran	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	49,896,977	52,850,015	55,262,595	57,891,601	59,440,015
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	24,496,563	25,440,075	26,085,165	27,113,389	27,797,566
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	2,222,411	2,447,849	2,593,193	2,716,643	2,785,631
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	5,115,346	5,180,600	5,531,916	5,723,184	5,856,222
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	3,564,666	3,836,642	4,079,201	4,264,194	4,319,579
<ol> <li>1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya</li> </ol>	8,659,669	9,762,794	10,440,219	11,150,999	11,613,667
1.f. Hotel dan Restoran	4,001,110	4,351,311	4,658,788	5,023,626	5,099,895
1.g. Lainnya	1,837,213	1,830,745	1,874,113	1,899,566	1,967,455
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	931,098	1,085,651	1,161,829	1,213,870	1,224,767
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	4,411,540	4,486,095	4,720,678	4,352,058	4,931,447
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	34,687,633	37,320,605	37,918,393	41,067,166	44,772,874
4.a. Bangunan	29,846,855	32,304,107	33,336,911	36,256,113	39,791,790
4.b. Non-Bangunan	4,840,778	5,016,498	4,581,482	4,811,053	4,981,083
5. Perubahan Inventori	-2,291,113	221,111	-601,592	-1,514,070	-1,923,718
6. Ekspor	20,330,821	23,309,515	22,005,207	20,525,425	24,634,893
7. Impor	33,773,586	41,181,903	38,122,043	36,447,696	40,625,498
PDRB (1+2+3+4+5+6-7)	74,193,370	78,091,091	82,345,067	87,088,354	92,454,780

<sup>\*</sup> Angka Sementara

<sup>\*\*</sup> Angka Sangat Sementara

Tabel 3. Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kota Palembang

					(FEISEII)
Komponen Pengeluaran	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	68.32	68.34	65.29	65.01	62.23
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	33.35	33.67	30.79	30.61	29.07
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	3.31	3.29	3.30	3.26	3.11
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	6.88	6.66	6.79	6.66	6.30
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	5.06	4.81	4.82	4.85	4.69
<ol> <li>Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya</li> </ol>	11.65	12.47	12.32	12.21	11.82
1.f. Hotel dan Restoran	5.68	5.39	5.29	5.45	5.30
1.g. Lainnya	2.39	2.05	1.99	1.98	1.94
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	1.31	1.43	1.35	1.30	1.23
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	6.31	5.78	5.48	4.88	5.58
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	55.87	54.46	47.30	47.52	47.23
4.a. Bangunan	49.76	49.59	43.24	43.94	43.85
4.b. Non-Bangunan	6.11	4.87	4.06	3.59	3.38
5. Perubahan Inventori	-1.32	2.04	-1.28	-1.96	-2.54
6. Ekspor	25.07	21.21	20.83	19.01	20.81
7. Impor	55.55	53.26	38.98	35.77	34.54
PDRB (1+2+3+4+5+6-7)	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

<sup>\*</sup> Angka Sementara

<sup>\*\*</sup> Angka Sangat Sementara

Tabel 4. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010

Menurut Pengeluaran, Kota Palembang

					(FEISEII)
Komponen Pengeluaran	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	6.73	5.92	4.56	4.76	2.67
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	7.72	3.85	2.54	3.94	2.52
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	7.07	10.14	5.94	4.76	2.54
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	10.32	1.28	6.78	3.46	2.32
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	7.47	7.63	6.32	4.54	1.30
<ol> <li>Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya</li> </ol>	3.96	12.74	6.94	6.81	4.15
1.f. Hotel dan Restoran	7.59	8.75	7.07	7.83	1.52
1.g. Lainnya	-4.84	-0.35	2.37	1.36	3.57
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	8.74	16.60	7.02	4.48	0.90
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	5.08	1.69	5.23	-7.81	13.31
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	6.15	7.59	1.60	8.30	9.02
4.a. Bangunan	7.06	8.23	3.20	8.76	9.75
4.b. Non-Bangunan	0.86	3.63	-8.67	5.01	3.53
5. Perubahan Inventori	-178.32	-109.65	-372.08	151.68	27.06
6. Ekspor	17.37	14.65	-5.60	-6.72	20.02
7. Impor	-2.50	21.94	-7.43	-4.39	11.46
PDRB (1+2+3+4+5+6-7)	5.85	5.25	5.45	5.76	6.16

<sup>\*</sup> Angka Sementara

<sup>\*\*</sup> Angka Sangat Sementara

Tabel 5. Indeks Implisit Produk Domestik Regional Bruto (2010 = 100)

Menurut Pengeluaran, Kota Palembang

					(FEISEII)
Komponen Pengeluaran	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	116.65	122.94	127.88	133.31	136.54
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	115.97	125.83	127.77	134.01	136.39
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	126.95	127.74	137.65	142.38	145.63
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	114.56	122.29	132.77	138.14	140.19
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	120.88	119.10	127.82	135.03	141.63
<ol> <li>Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya</li> </ol>	114.65	121.48	127.74	129.94	132.70
1.f. Hotel dan Restoran	121.02	117.78	122.87	128.76	135.53
1.g. Lainnya	110.68	106.36	114.72	123.63	128.86
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	120.11	125.47	126.17	127.52	130.70
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	121.78	122.49	125.71	133.18	147.68
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	137.21	138.73	135.03	137.38	137.59
4.a. Bangunan	142.03	145.95	140.41	143.86	143.72
4.b. Non-Bangunan	107.51	92.22	95.92	88.53	88.60
5. Perubahan Inventori	49.23	875.86	229.80	153.74	172.27
6. Ekspor	105.04	86.52	102.46	109.96	110.15
7. Impor	140.13	122.96	110.67	116.50	110.88
PDRB (1+2+3+4+5+6-7)	114.83	121.75	131.45	136.32	141.06

<sup>\*</sup> Angka Sementara

<sup>\*\*</sup> Angka Sangat Sementara

Tabel 6. Laju Pertumbuhan Indeks Implisit Produk Domestik Regional Bruto (2010 = 100)

Menurut Pengeluaran, Kota Palembang

					(FEISEII)
Komponen Pengeluaran	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	5.87	5.40	4.01	4.25	2.42
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	6.29	8.50	1.54	4.88	1.77
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	9.93	0.62	7.76	3.44	2.28
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	4.75	6.75	8.57	4.04	1.49
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	3.76	-1.47	7.32	5.64	4.89
<ol> <li>1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya</li> </ol>	4.06	5.96	5.15	1.73	2.12
1.f. Hotel dan Restoran	6.70	-2.68	4.33	4.79	5.26
1.g. Lainnya	8.58	-3.90	7.85	7.77	4.23
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	8.76	4.46	0.56	1.07	2.49
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	3.33	0.58	2.63	5.94	10.88
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	8.71	1.11	-2.67	1.74	0.15
4.a. Bangunan	9.36	2.76	-3.80	2.46	-0.10
4.b. Non-Bangunan	2.45	-14.22	4.02	-7.71	0.08
5. Perubahan Inventori	-32.38	1,679.17	-73.76	-33.10	12.05
6. Ekspor	4.20	-17.63	18.42	7.32	0.18
7. Impor	12.96	-12.25	-10.00	5.27	-4.82
PDRB (1+2+3+4+5+6-7)	6.93	6.03	7.97	3.70	3.48

<sup>\*</sup> Angka Sementara

<sup>\*\*</sup> Angka Sangat Sementara



1.	Badan Pusat Statistik, Tabel Input Output Indonesia, berbagai seri, Jakarta.
2.	, Incremental Capital Output Ratio Sektor Industri, 1980-1990. Jakarta.
3.	, Pendapatan Nasional Indonesia, berbagai seri, Jakarta.
4.	, Statistik Industri, berbagai seri, Jakarta.
5.	, Statistik Listrik, Gas dan Air, berbagai seri, Jakarta.
6.	, Statistik Pertambangan Migas, berbagai seri, Jakarta.
7.	_, Statistik Pertambangan Non Migas, berbagai seri, Jakarta.
8.	, Statistik Konstruksi, berbagai seri, Jakarta.
9.	"Statistik Matriks Investasi Pemerintah Pusat, berbagai seri, Jakarta.
10.	, Statistik Keuangan BUMN dan BUMD, 1997, Jakarta 2000.
11.	, Profil Ekonomi Rumahtangga 1998, Jakarta 1999.
12.	Frenken Jim, How To Measure Tangible Capital Stocks, Netherlands, 1992.
13.	Host Poul, Madsen, Macroeconomic Accounts An Overview, Pamphlet Series. No. 29
	Washington DC. 1979.
14.	Keuning. J. Steven, An Estimate of the Fixed Capital Stock By Industry and Types of Capital
	Goods in Indonesia, Statistical Analysis Capability Program, Project Working Paper, Series
	No.4, Jakarta 1988.
15.	United Nations, A System of National Accounts, Studies in Methods, Series F No.2 Rev.3
	New York, 1968.
16.	, Input-Output Table and Analysis. Studies in Methods. Series F No. 14 Rev
	1. New York. 1973.
17.	, Handbook of National Accounting for Production, Sources and Methods
	Series F No. 39, New York, 1986.
18.	, Handbook of National Accounting, Public Sector Accounts, Studies Methods
	Series F No. 50. New York, 1988.
19.	, Link between Business Accounting and National Accounting, Public Sector
	Accounts, Studies Methods, Series F No. 76. New York, 2000.
20.	Verbiest Piet, Investment Matrix, Hasil Kerjasama Asian Development Bank dengan Badar
	Pusat Statistik, Jakarta, 1997.
21.	Ward. Michael, The Measurement of Capital: Methodology of Capital Stock Estimates in OECD
	Countries, Paris, 1976.
22.	World Bank, System of National Accounts 1993, Bahan Kursus, Washington DC. 1993

